



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

SKRIPSI

**FAISAL REZA
1006811936**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**FAISAL REZA
1006811936**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Faisal Reza

NPM : 1006811936

Tanda Tangan :



Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Faisal Reza
NPM : 1006811936
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul Skripsi :
*) Indonesia : Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak
*) Inggris : The Effect of the Board of Commissioners and The Audit Committee on Tax Avoidance


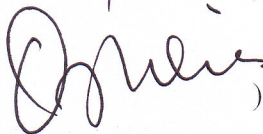

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Christine S.E., Ak., M.Int.Tax

Penguji : Dahlia Sari S.E, M.Si.

Penguji : Sonya Octaviana S.E, M.Ak

()
()
()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi,

Sri Nurhayati, SE, MM, S.A.S
NIP : 19600317 198602 2001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas penulisan skripsi ini. Dengan rahmat dan izin dari-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari program Ektensi-Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari dan sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Hj. Farida dan Alm. Ridwan Nasution yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Christine selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membantu penulis menyusun skripsi ini. Kesediaan dan nasehat dari ibu Christine sangat membantu penulis.
3. Tim penguji terhadap skripsi ini, yaitu ibu Dahlia dan ibu Sonya yang telah bersedia menjadi penguji.
4. Kakak-kakak penulis, yaitu Devi, Rinaldi, dan Nadia yang telah memberikan dorongan moral dan nasehat yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan sebaik-baiknya dan juga Nenek penulis yang tercinta.
5. Seluruh Dosen FEUI yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah bagi penulis di masa sekarang dan akan datang.
6. Paman-paman dan tante-tante penulis yang juga sering memberikan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat dan teman-teman ekstensi akuntansi angkatan 2010 FEUI, yaitu Ondi, Mone, Bari, Ghani, Bowo, Dika, Nita, Wynda, Wendi, Arin, Citra, Jebe, Aldi, Widi, Bacil, Bram.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan membantu penyusunan skripsi ini, yaitu Edwin, Roni, Try, Mas Dodo, Radhit, Alvi, Fia, Edhi, Putra, Fajar.
9. Teman-teman dari kecil, yaitu Gary, Ogil, Said, Rendy, dan Azhar.
10. Karyawan-karyawan FEUI, khususnya perpustakaan yang membantu dalam peminjaman buku-buku yang dibutuhkan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membacanya dan membutuhkannya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kemudahan dalam perjalanan hidup kita semua, serta kita tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan-Nya.

Jakarta, 10 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Reza
NPM : 1006811936
Program Studi : S1 Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

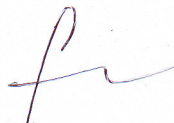
beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



Faisal Reza

ABSTRAK

Nama : Faisal Reza
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *GAAP ETR* dan *Current ETR*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui *GAAP ETR* dan juga *current ETR*, jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui *current ETR*, namun mempengaruhi *GAAP ETR* dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap *current ETR* dan juga *GAAP ETR*, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi *current ETR*, namun mempengaruhi *GAAP ETR* dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi *current ETR* dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat, namun latar belakang keuangan komite audit tidak mempengaruhi *GAAP ETR*.

Kata kunci :
penghindaran pajak, *current ETR*, *GAAP ETR*, dewan komisaris, komite audit.

ABSTRACT

Name : Faisal Reza
Study Program : Accounting
Title : The Effect of the Board of Commissioners and the Audit Committee on Tax Avoidance

This research aims to examine the influence of the board of commissioners as measured by the number of board meetings, the percentage of attendance by commissioners, and the chairman of the board of commissioners, as well as the influence of audit committees as measured from the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, attendance percentage of audit committee members, and financial background of the members of the audit committee on tax avoidance as measured by GAAP ETR and Current ETR. The results of this research indicate that the meetings and the independence of the chairman of the board of commissioners does not have an influence on whether tax avoidance is measured by current GAAP ETR and ETR, the number of audit committee members do not affect tax avoidance as measured by current ETR, but affect the GAAP ETR in which the increasing member audit committee also increased the tax avoidance. The number of meetings do not impact the current ETR and GAAP ETR, whereas the attendance of members of the audit committee meeting did not affect the current ETR, but affect the GAAP ETR where the higher attendance rate the higher the likelihood of tax avoidance, and also background affect the current financial ETR where a growing number of audit committee members who have the financial background of the tax evasion is also increased, but the audit committee financial background does not affect the GAAP ETR.

Keyword :
tax avoidance, current ETR, GAAP ETR, board of commissioners, the audit committee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Tarif Efektif Pajak	9
2.2 Manajemen Pajak	11
2.3 Penghindaran Pajak	13
2.4 Corporate Governance.....	14
2.4.1 Dewan Komisaris.....	18
2.4.2 Komite Audit	20
2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan.....	23
2.6 Penelitian Sebelumnya	25
2.7 Pengembangan Hipotesis	27
2.7.1 Pengaruh Aktifitas Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak.....	27
2.7.2 Pengaruh Kepemimpinan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.....	28
2.7.3 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	28
2.7.4 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak....	29
2.7.5 Pengaruh Latar Belakang Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	30
3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Kerangka Pemikiran	32
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.3 Metode Pengambilan Sampel.....	34
3.4 Model Penelitian	34

3.5	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	36
3.5.1	Variabel Dependen	36
3.5.2	Variabel Independen	36
3.5.3	Variabel Kontrol	39
3.5.4	Teknik Pengolahan Data	39
3.6	Metode Pengujian Asumsi Klasik.....	41
3.7	Pengujian Hipotesis.....	42
4.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Sampel Penelitian	44
4.2	Analisis Statistik Deskriptif Model Pertama.....	44
4.3	Pemilihan Model Estimasi Model Pertama.....	47
4.3.1	Uji Chow.....	47
4.3.2	Uji Hausman.....	48
4.4	Uji Asumsi Klasik	49
4.4.1	Uji Heterokedastitas.....	50
4.4.2	Uji Autokolerasi.....	50
4.4.3	Uji Multikolerasi.....	50
4.5	Uji F	50
4.6	Uji <i>Adjusted R²</i>	51
4.7	Uji Hipotesis Penelitian.....	52
4.7.1.	Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris (B_MEET) dan Persentase Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris (B_ATTEND) terhadap Penghindaran Pajak (<i>GAAP ETR</i>)	52
4.7.2.	Pengaruh Kepemimpinan Komisaris Independen (B_HEAD) terhadap Penghindaran Pajak (<i>GAAP ETR</i>)	53
4.7.3	Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit (AU_QUANTITY) Penghindaran Pajak (<i>GAAP ETR</i>).....	53
4.7.4	Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit (AU_MEET) dan Pengaruh Persentase Kehadiran Komite Audit (AU_ATTEND) Penghindaran Pajak (<i>GAAP ETR</i>)	54
4.7.5	Pengaruh Latar Belakang Keuangan Anggota Komite Audit (AU_FINEXP) terhadap Penghindaran Pajak (<i>GAAP ETR</i>).....	55
4.7.6	Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Penghindaran Pajak (<i>GAAP ETR</i>).....	55
4.8	Pemilihan Model Estimasi Model Kedua.....	56
4.8.1	Uji Chow.....	56
4.8.2	Uji Hausman.....	57
4.9	Uji Asumsi Klasik.....	58
4.9.1	Uji Heterokedastitas.....	58
4.9.2	Uji Autokolerasi.....	59
4.9.3	Uji Multikolerasi.....	59
4.10	Uji F.....	60
4.11	Uji <i>Adjusted R²</i>	60
4.12	Uji Hipotesis Penelitian.....	60
4.12.1	Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris (B_MEET) dan Persentase Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan	

Komisaris (B_ATTEND) terhadap Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>).....	60
4.12.2 Pengaruh Kepemimpinan Komisaris Independen (B_HEAD) terhadap Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>).....	61
4.12.3 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit (AU_QUANTITY) Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>).....	62
4.12.4 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit (AU_MEET) dan Pengaruh Persentase Kehadiran Komite Audit (AU_ATTEND) Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>).....	63
4.12.5 Pengaruh Latar Belakang Keuangan Anggota Komite Audit (AU_FINEXP) Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>).....	64
4.12.6 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Current ETR</i>).....	64
5. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran.....	67
5.3.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	67
5.3.2 Saran Untuk Perusahaan.....	67
5.3.3 Saran Untuk Pemerintah.....	68
5.3.3 Saran Untuk Investor dan Pengguna Informasi.....	68
DAFTAR REFERENSI	69
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pemilihan Sampel	44
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.3	Uji Chow Model Pengujian Pertama.....	48
Tabel 4.4	Uji Haussman Model Pengujian Pertama	49
Tabel 4.5	Hasil Regresi Model Pertama.....	49
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas Model Pertama.....	51
Tabel 4.7	Uji Chow Model Kedua	57
Tabel 4.8	Uji Haussman Model Kedua	57
Tabel 4.9	Hasil Regresi Model Kedua	58
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas Model Kedua	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan.....	74
Lampiran 2. Output Eviews Model 1.....	77
Lampiran 3. Output Eviews Model 2.....	80

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi-regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara.

Pajak bersifat “memaksa”, dimana setiap orang atau badan sebagai wajib pajak yang memiliki beban atau hutang pajak wajib melunasi beban atau hutang pajaknya dan dapat dikenakan sanksi atau denda jika tidak memenuhi kewajiban pajaknya, serta orang atau badan yang membayar pajak tersebut juga tidak mendapat manfaat secara langsung dari pajak yang dibayarnya.

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). *Budgeter* berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri di dalam APBN, sedangkan fungsi *reguler* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2009).

Berbeda dengan pemerintah, sebaliknya perusahaan berusaha agar jumlah pajak yang dibayar seminimal mungkin. Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan labanya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Jumlah beban pajak yang cukup besar membuat laba yang didapat perusahaan berkurang. Untuk memperoleh laba yang diharapkan, maka salah satu usaha perusahaan adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau menjadi bebannya tersebut sehingga mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian pajaknya sehingga efisiensi pajak dapat tercapai.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam melakukan manajemen pajak diperlukan pengawasan agar tindakan manajemen pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan. Salah satu mekanisme dari sistem *corporate governance* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan *corporate governance*. Komite audit membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dewan komisaris dan komite audit juga memiliki peran dalam mengurangi atau bahkan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan dimana manajemen atau pengelola perusahaan seringkali melakukan praktik manajemen laba dengan melakukan manipulasi atau kecurangan untuk memperoleh laba yang diharapkan dan laporan keuangan perusahaan terlihat baik. Dalam penelitian Xie *et. al.* (2003) menemukan bahwa frekuensi rapat dan independensi dewan mempengaruhi praktik manajemen laba, selain itu jumlah rapat komite audit juga mempengaruhi manajemen laba. De Zoort dan Salterio (2001) menemukan bahwa efektivitas komite audit tidak terlepas dari masalah kompetensi atau keahlian yang dimiliki

oleh masing-masing anggota. Carcello *et. al.* (2008), menemukan bahwa latar belakang keuangan komite audit mempengaruhi manajemen laba. Jumlah komite audit juga merupakan faktor yang penting dalam melakukan pengawasan, Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa ukuran dari komite audit mempengaruhi manajemen laba.

Manajemen laba tidak semuanya bermakna negatif, manajemen laba dapat dilakukan tanpa harus melakukan manipulasi atau kecurangan yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi perpajakan atau melakukan manajemen pajak, sehingga laba yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu bentuk manajemen pajak adalah penghindaran pajak, yaitu suatu cara melakukan efisiensi perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Dhaliwal *et. al.* (2003) menyimpulkan bahwa beban pajak perusahaan digunakan untuk mencapai laba yang diinginkan. Cook *et. al.* (2006) menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilihat dari perubahan *Effective Tax Rate (ETR)*. Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan pengukuran adanya penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. *ETR* digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Dyreng *et. al.* (2007) mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *ETR*. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak pada suatu perusahaan, sehingga *tax savings* perusahaan meningkat. Pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan sehingga perusahaan berusaha mengecilkan biaya atau beban pajaknya untuk memperoleh laba yang diharapkan dengan melakukan manajemen pajak yang diperbolehkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara *governance* dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena 2 alasan, yaitu:

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran *corporate governance* dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.

2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana *governance* berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *governance* berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Dalam mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan beberapa cara, namun pada penelitian ini menggunakan *ETR* untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang diukur dengan 2 pengukuran *ETR*, yaitu *ETR* dengan rumus *tax expense* dibagi *pretax income* atau disebut juga *GAAP ETR* seperti yang digunakan Dyreng *et. al.* (2007) dan *ETR* dengan menggunakan rumus *current tax expense* dibagi *pretax income* atau disebut juga *current ETR* seperti yang digunakan oleh Lestari (2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengganti manajemen laba sebagai variabel dependen dengan penghindaran pajak, sehingga penelitian ini menguji pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris diukur dari frekuensi rapat, tingkat kehadiran, ketua, dan faktor komite audit yang diukur dari frekuensi rapat, persentase kehadiran anggota dalam rapat, latar belakang keuangan dan jumlah anggota komite audit, sehingga dari penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara empiris ingin menguji apakah dewan komisaris dan komite audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, khususnya pada perusahaan di industri non keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan dalam industri non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu tahun 2009-2010 dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris yang diukur dari frekuensi rapat dewan komisaris, persentase tingkat kehadiran anggota

(termasuk ketua) dewan komisaris dalam rapat, yang menjadi ketua dewan komisaris (variabel *dummy*) dan komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit dalam rapat, dan latar belakang komite audit untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi utama penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang inti dari keseluruhan penelitian ini.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesa

Bab ini terdiri dari landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu definisi dari masing-masing indikator yang berhubungan dengan permasalahan, dimana teori-teori tersebut dianggap relevan dan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bagian ini membahas tentang desain penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian yang meliputi desain penelitian dan metode pengumpulan data, metode pemilihan sample, model penelitian, hipotesis penelitian, dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 : Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan analisis data, objek penelitian dan analisis kuantitatif. Dalam bab ini pula akan disajikan interpretasi dan analisis atas hasil-hasil pengujian serta ikhtisar hasil pengujian.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan tentang kesimpulan akhir keseluruhan analisis dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi penelitian berikutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Perusahaan menganggap pajak adalah suatu beban yang harus diminimalkan agar memperoleh laba yang tinggi atau kas yang dikeluarkan tidak terlalu besar, sehingga pihak manajemen perusahaan sering melakukan cara-cara tertentu untuk mengurangi beban pajaknya, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang undang-undang perpajakan yang berlaku.

Prof. Dr. M.J.H Smeets (1951) dalam Pohan (2011) mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual yang maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Definisi pajak menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof Dr. P.J.A Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2009) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayar wajib pajak yang bersifat wajib dan memaksa yang akan dikenakan sanksi

apabila tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut golongannya, pajak terdiri dari :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya, dalam arti memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam arti tidak memfokuskan pada diri wajib pajak.

Asas pemungutan pajak :

1. Asas Domisili (tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

Sistem pemungutan pajak :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajak terutang, sedangkan pemerintah bersifat pasif dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

2.1.1 Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajak adalah 1). tarif pajak *statutory (statutory tax rate)* yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu, 2). Tarif pajak rata-rata (*Average Tax rate*) yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenaan pajak (laba kena pajak), 3). Tarif pajak marjinal (*marjinal tax rate*) yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak. 4). Tarif pajak efektif (TPE) yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak ada empat, yaitu:

1. Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Regresif

Yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.

3. Tarif Progresif

Yaitu tarif pajak yang akan semakin meningkat sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

4. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak dimana kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak Efektif (TPE) atau *Effective Tax Rates (ETR)* adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2009). Akuntan keuangan mendefinisikan *ETR* sebagai rasio beban pajak untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Halperin dan Sansing, 2005).

Mills *et. al.* (1998) menggunakan *ETR* perusahaan untuk mengukur efektivitas manajemen pajak dalam penelitiannya atas *return* investasi dalam manajemen pajak. *ETR* seringkali digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan ataupun untuk mengukur penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dyrenge *et. al.* (2007) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak yang diukur melalui *GAAP ETR* dan *cash ETR* dimana *GAAP ETR* untuk melihat pajak yang dilaporkan oleh perusahaan menurut akuntansi, sedangkan *cash ETR* untuk melihat jumlah pajak yang dibayar perusahaan, namun *GAAP ETR* dan *cash ETR* memiliki beberapa kekurangan. *GAAP ETR* memiliki kekurangan karena untuk menghitungnya menggunakan *deferred tax* yang tidak merefleksikan secara tepat jumlah pajak yang dibayar. *Cash ETR* memiliki kekurangan karena pajak yang diukur adalah tidak hanya pajak penghasilan. Untuk mengukur pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan maka menggunakan *current ETR* atau pajak kini untuk melihat jumlah pajak yang dibayar, karena mengukurnya

menggunakan *current tax expense* atau pajak kini yang merupakan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan.

2.2 Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Djaiz (1971) dalam Pohan (2011) menyebutkan bahwa manajemen pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut Pohan (2011) menyimpulkan bahwa, manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Pohan (2011) juga menjelaskan secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2008) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. **Kebijakan perpajakan**

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.

2. **Undang-undang perpajakan**

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), karena tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

3. **Administrasi perpajakan**

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus

dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Menurut Rego (2003), penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2006) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*.

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, 2011).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-

undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

2.4 *Corporate Governance*

Definisi *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*shareholders*).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.

Corporate governance muncul untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap investor bahwa dana yang mereka investasikan dalam perusahaan digunakan secara tepat dan efisien serta tujuan perusahaan dapat

tercapai yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan juga meningkat. Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam *corporate governance* telah diaplikasikan dalam perusahaan dengan baik dan efektif sehingga perusahaan dapat berkembang dan semakin besar.

OECD menyebutkan bahwa kerangka *corporate governance* harus memastikan petunjuk strategis dari perusahaan, efektivitas pengawasan terhadap manajemen oleh anggota dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan *shareholders*. Bhagat and Bolton (2008) menemukan hubungan bahwa *corporate governance* yang baik berhubungan dengan kinerja yang lebih pada baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Penerapan dan pelaksanaan *corporate governance* didukung oleh tiga (3) pilar utama yang diharapkan akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan, 3 pilar tersebut yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam peraturan BAPEPAM LK X.K.6 Lampiran Kep-134/BL/2006 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik No.2 poin g dijelaskan tentang Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

Teori-teori yang berhubungan dengan *corporate governance* diantaranya ada dua, yang pertama adalah *agency theory* yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). Dalam *agency theory* ada beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar yaitu :

1. *Agency Conflict* yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan.
2. *Agency problem* yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Kedua, *stewardship theory* merupakan harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah dasar kepemimpinan dan hubungan antara *shareholder* dengan manajemen, atau bisa jadi antara *top management* dengan jajaran manajemen lain di bawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan. *Stewardship theory* dapat dibangun diatas filosofi mengenai sifat dasar manusia bahwa pada hakekatnya manusia itu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Dalam perkembangannya di Indonesia, pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang mengeluarkan pedoman untuk *corporate governance* yang pertama di Indonesia. KNKCG menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan di sektor publik. Hal tersebut dilakukan dalam rangka :

1. Mendorong kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh *stakeholders*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penekanan terhadap pentingnya penciptaan sistem *monitoring* yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan dan tugas antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang juga meliputi evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen agar bertindak sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, perusahaan harus dikelola secara tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Tanggung Jawab

Responsibilitas adalah tanggung jawab dari manajemen, pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang, tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di perusahaan tidak dapat diintervensi/dipengaruhi oleh pihak lain. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan semua pemegang saham yang berasaskan atas kewajaran dan kesetaraan.

Salah satu tujuan dari diterapkannya *corporate governance* adalah laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan oleh manajemen disajikan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pengguna informasi dari laporan keuangan tersebut karena mempengaruhi keputusan pengguna tersebut. Untuk mencapai tujuan diterapkannya *corporate governance*, maka dibentuklah suatu sistem dan susunan tugas dan wewenang dewan komisaris dan komite audit agar *corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pembentukan dewan komisaris dan komite audit ini merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan untuk meningkatkan keakuratan dan kehandalan dari informasi keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik, disebutkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emiten harus memuat laporan pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari laporan *corporate governance*. Informasi-informasi yang dipaparkan antara lain jumlah rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dalam dewan komisaris maupun komite audit. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat meminimalisir praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, dimana hal tersebut dapat merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi bias dan tidak akuntabel.

2.4.1 Dewan Komisaris

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance*, karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Menurut UU PT No 40 tahun 2007,

dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi *two tier system* pada sistem hukumnya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan *CEO duality* yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan. Adams (2003) menyimpulkan bahwa dewan yang jarang melakukan pengawasan perusahaannya cenderung lebih banyak menghadapi ketidakpastian. Anderson *et. al.* (2003) menyatakan bahwa dewan yang aktif yang diukur melalui frekuensi rapat dewan dan kompetensi dewan dapat mempengaruhi efektivitas peran dewan. Brick dan Chidambaram (2007) menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut OECD, tanggung jawab anggota dewan yaitu:

1. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad yang baik, dengan ketelitian dan kepedulian, dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
2. Dimana keputusan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
3. Dewan komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi. Dimana harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
4. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi utama tertentu, termasuk:
 - a. Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana utama dari tindakan, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, melakukan pengawasan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi.
 - b. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
 - c. Memilih, memberikan kompensasi, mengawasi dan bila perlu, mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.

- d. Menyelaraskan remunerasi untuk eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
 - e. Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.
 - f. Mengawasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari anggota dewan, manajemen dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - g. Memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem kontrol yang tepat telah dilakukan, khususnya sistem untuk manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
 - h. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
5. Dewan harus dapat melakukan penilaian yang independen dan objektif dalam hubungan perusahaan.
- a. Dewan harus mempertimbangkan untuk menugaskan cukup banyak anggota dewan non-eksekutif yang mampu menggunakan penilaian yang independen untuk tugas yang memiliki potensi konflik kepentingan.
 - b. Ketika dewan komite ditetapkan, mandat mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan.
 - c. Anggota dewan harus dapat berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka.
6. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses untuk informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

2.4.2 Komite Audit

Daniri (2006) menyebutkan bahwa sejak direkomendasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi untuk mengawasi kinerja

manajemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut.

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5 yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholders*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan (Pamudji dan Trihartati, 2008).

Dalam surat edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Indonesia SE 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
3. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Fungsi komite audit terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris

Struktur komite audit terdiri dari:

1. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan komisaris.
2. Komite audit sekurang-kurangnya tiga orang.
3. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris perusahaan bertindak sebagai ketua komite audit.

BAPEPAM mengharuskan komite audit membuat pedoman kerja komite audit. Menurut aturan BAPEPAM mengenai tugas dan tanggung jawab komite audit berdasarkan Kep. No. 29/PM/2004 sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang ditujukan kepada perusahaan.

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan

Agoes dan Trisnawati (2003) menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang perusahaan. Siklus akuntansi pajak meliputi siklus akuntansi keuangan yang telah disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) (Niswonger dan Fees, 2007) dalam Gunadi (2007). Akuntansi perpajakan secara mendasar merupakan implementasi dari ketentuan perpajakan. Di sisi lain, konsep dasar akuntansi lebih bersifat netral agar bisa diterima secara umum. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan pajak berbeda dari pelaporan akuntansi komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat diaplikasikan pada keduanya, artinya sepanjang aturan perpajakan tidak mengatur, maka tata cara dan aturan pembukuan mengikuti ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Laba dalam laporan keuangan belum tentu sama jumlahnya dengan laba fiskal, karena peraturan yang menjadi dasar pelaporan laba akuntansi adalah PSAK, sedangkan yang menjadi dasar untuk menghitung laba fiskal adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga untuk memperoleh jumlah pajak yang seharusnya dibayar maka dilakukan rekonsiliasi fiskal. Salah satu hal yang dapat membuat perbedaan antara akuntansi dan pajak adalah karena adanya penghasilan-penghasilan dan biaya-biaya yang diakui dalam akuntansi tetapi tidak boleh diakui dalam perpajakan atau sebaliknya. Menurut PSAK No. 23, penghasilan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Definisi penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 adalah sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang digunakan

untuk komunikasi atau menambah kekayaan wajib pajak. Beban menurut standar akuntansi keuangan mencakup kerugian atau beban yang timbul atas pengeluaran dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan dalam UU PPh No. 36 tahun 2008, biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Tujuan akuntansi komersial dan akuntansi pajak berbeda, dimana akuntansi komersial diantaranya bertujuan untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi lainnya pada pengguna laporan keuangan, sedangkan akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak (Gunadi, 2007). Seringkali terjadi perbedaan antara peraturan dalam akuntansi dengan peraturan perpajakan, apabila hal ini terjadi maka peraturan perpajakan wajib diutamakan.

Prinsip dalam akuntansi perpajakan, yaitu:

1. *Going concern*

Konsep kesinambungan usaha sebagai prinsip dasar akuntansi juga dianut dalam akuntansi perpajakan. Pembebanan atas harta melalui penyusutan dan kompensasi kerugian fiskal merupakan bentuk dari prinsip kesinambungan usaha.

2. Substansi mengalahkan bentuk

Seringkali ada berbagai macam nama untuk sebuah akun yang pada dasarnya adalah sama. Maka dalam akuntansi pajak, yang diperhatikan adalah substansi dari transaksi yang terjadi dibandingkan nama akunnya. Pasal 28 UU KUP menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembukuan harus dengan itikad baik dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Tidak bersifat netral

Pembukuan dalam pajak bertujuan untuk kepentingan perpajakan, yaitu agar pihak fiskus maupun pihak wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang, baik PPh, PPN, dan pajak-pajak lainnya

4. Prinsip taat asas

Merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya oleh Xie *et. al.* (2003) menyatakan bahwa dewan komisaris dan komite audit yang merupakan bagian dari *corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Dewan komisaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengawasi kinerja perusahaan dan dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dibantu oleh komite-komite di bawahnya, salah satunya adalah komite audit. Dhaliwal *et. al.* (2006) menyebutkan bahwa komite audit menentukan kuatnya *corporate governance*. Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa komite audit yang lebih aktif, latar belakang, dan jumlah rapat dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan level yang rendah. Keahlian anggota komite audit dalam bidang keuangan diperlukan, karena anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan dianggap lebih memiliki pengalaman dan pelatihan-pelatihan keuangan, sehingga dianggap lebih dapat mencegah manajemen laba melalui manipulasi atau kecurangan yang dilarang untuk dilakukan, sehingga mendorong tindakan-tindakan yang legal untuk dilakukan dalam memperoleh laba yang diharapkan. McDaniel *et. al.* (2002) menemukan hubungan antara *financial expertise* dengan kualitas laporan keuangan sehingga harus mempertimbangkan agar *financial expertise* dipertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk memilih komite audit. Menurut Mangena dan Pike (2005), *financial expertise* yang dimiliki anggota komite audit mempengaruhi ekstensifikasi pengungkapan (*disclosure*) pada laporan keuangan interim perusahaan.

Mengurangi beban pajak merupakan salah satu cara untuk memperoleh laba yang diharapkan, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bahkan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk memperkecil pajaknya. Dhaliwal *et. al.* (2003) mengatakan bahwa beban pajak perusahaan digunakan untuk mencapai laba yang diinginkan dan menemukan bahwa perusahaan memiliki *ETR* yang lebih kecil ketika mereka tidak melakukan *forecast* (perkiraan), hal tersebut konsisten dengan perusahaan yang menurunkan beban pajak (*tax expense*) jika sumber selain pajak dalam melakukan manajemen laba tidak mencapai target.

Menurut Suandy (2008), tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar, karena dengan manajemen pajak, wajib pajak akan berusaha melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai prosedur.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Friese *et. al.* (2006) menemukan hubungan bahwa peraturan perpajakan dapat mempengaruhi *corporate governance* dengan memberikan hak istimewa atau memberikan denda atau sanksi. Minnick dan Noga (2011) menemukan bahwa *governance* memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen pajak, dimana perusahaan dengan struktur *governance* yang berbeda memilih strategi manajemen pajak yang berbeda.

Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa kualitas *governance* memainkan peranan yang penting dalam hubungannya dengan pajak. Penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak, banyak dipakai sebagai salah satu cara agar laba yang diinginkan tercapai tanpa harus melakukan manipulasi dalam laporan keuangan karena beban pajak diperoleh melalui rekonsiliasi fiskal dengan cara yang legal. Dalam mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan ETR seperti yang digunakan oleh Dyreng *et. al.* (2007) yang menggunakan *GAAP ETR* dan *Cash ETR* untuk mengukur penghindaran pajak. Lestari mengukur *ETR* dengan menggunakan beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak atau dapat disebut *current ETR*. Rumus *current ETR* juga merupakan salah satu rumus yang digunakan Derashid dan Zhang (2003) dalam penelitiannya.

Bernad (2011) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *ETR* yang diukur dengan beban pajak dan berpengaruh negatif dengan *ETR* yang diukur dengan beban pajak yang dibayar dan persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap beban pajak dan beban pajak yang dibayar.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Terdapat tujuh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai hubungan dewan komisaris dan komite audit serta terhadap penghindaran pajak, seperti yang disebutkan di bawah ini:

2.7.1 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan termasuk dalam melakukan efisiensi pajak. Penelitian Xie *et. al.* (2003) menemukan bahwa semakin sering rapat dewan komisaris maka manajemen laba semakin kecil. Namun, manajemen laba tidak selalu bermakna negatif. Manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa cara tanpa harus mengurangi kredibilitas laporan keuangan atau manipulasi, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak. Hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan laba yang diinginkan dengan melakukan efisiensi beban pajak. Semakin seringnya rapat dewan komisaris maka pengawasan semakin meningkat. Semakin meningkatnya pengawasan dapat mengurangi praktik manajemen laba dengan cara yang negatif dan mendorong manajemen laba dengan cara yang positif dimana salah satunya dilakukan melalui efisiensi beban pajak, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan. Vafeas (1999) menggunakan pengukuran jumlah rapat yang dilakukan dewan dalam mengukur pengawasan yang dilakukan dewan dan menemukan bahwa jumlah rapat akan meningkat apabila kinerja perusahaan buruk dan jumlah rapat tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan pada tahun-tahun berikutnya. Inefisiensi dalam pengeluaran pajak merupakan salah satu bentuk dari buruknya kinerja perusahaan, sehingga meningkatnya kinerja perusahaan juga dapat membuat efisiensi pajak meningkat.

Berdasarkan literatur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aktivitas dewan seharusnya memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persentase kehadiran anggota dewan komisaris dapat menentukan efektivitas kinerja dewan dalam menjalankan tugasnya. Semakin tingginya persentase kehadiran anggota dewan dalam rapat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris, sehingga masalah yang dibahas dalam rapat menjadi fokus dan komunikasi antar anggota menjadi lebih lancar.

H₂: Tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.7.2 Pengaruh Ketua Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Di Indonesia fungsi dewan komisaris berbeda dengan fungsi dewan direksi, karena Indonesia menganut sistem *two tier* sehingga tidak terjadi *CEO duality*. Peran komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan sehingga *corporate governance* dapat berjalan efektif. Minnick dan Noga (2010) menyimpulkan bahwa independensi dewan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Bernad (2011) menemukan bahwa persentase komisaris independen dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Semakin rendahnya *ETR* menunjukkan bahwa indikasi terjadinya penghindaran pajak semakin besar.

Berdasarkan literatur sebelumnya, penelitian ini juga memasukkan variabel kepemimpinan pihak independen dalam dewan komisaris sebagai variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang diketuai oleh pihak independen akan diberi nilai satu dan sebaliknya, serta menyimpulkan bahwa kepemimpinan pihak independen dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Kepemimpinan pihak independen dalam dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.7.3 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa semakin baiknya *corporate governance* akan meningkatkan manajemen pajak yang dilakukan

perusahaan. Kuatnya *governance* juga ditentukan oleh jumlah anggota komite audit (Dhaliwal *et.al.*, 2006). Suaryana (2005) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit mempunyai kualitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan ditentukan oleh beban pajak perusahaan dimana efisiensi pajak yang dilakukan dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Efisiensi pajak melalui penghindaran pajak bukan merupakan suatu bentuk manipulasi laba, melainkan hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan pajak yang baik dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga kualitas laba juga meningkat.

Jumlah anggota komite audit telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari 3 orang, dimana sekurang-kurangnya 1 orang berasal dari komisaris independen dan 2 orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan literatur–literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, untuk itu hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Jumlah anggota dalam komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.7.4 Pengaruh Aktivitas Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam menerapkan *corporate governance*, komite audit memainkan peran yang penting karena membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas audit internal maupun eksternal. Menurut Dhaliwal (2006), frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya *governance* dari komite audit. Semakin besar perusahaan membuat tingkat pengawasan yang dilakukan juga semakin meningkat, komite audit yang berfungsi mengawasi harus meningkatkan efektivitas kinerja mereka termasuk meningkatkan frekuensi rapat mereka.

Berdasarkan literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Selain frekuensi rapat, tingkat kehadiran anggota komite audit juga merupakan hal yang penting dalam menentukan kuatnya *governance* perusahaan. Dalam keputusan ketua BAPEPAM LK Kep 134/BL/2006 menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mengungkapkan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₆: Tingkat kehadiran komite audit dalam rapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.7.5 Pengaruh Latar Belakang Keuangan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Faktor lain yang menentukan kuat atau tidaknya suatu *governance* adalah anggota komite audit yang mempunyai latar belakang keuangan. Komite audit yang memiliki latar belakang keuangan mempunyai pengalaman dan *training* untuk mengerti masalah keuangan dan laporan keuangan serta anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, dimana komite audit yang terdiri minimal dari 3 orang harus memiliki minimal 1 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Menurut Dhaliwal *et. al.* (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya ahli akuntansi (*accounting expert*) di komite audit, secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. De Zoort dan Salterio (2001) menyatakan efektivitas komite audit tidak

terlepas dari masalah kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh masing–masing anggota.

Berdasarkan literatur–literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komite audit yang memiliki latar belakang keuangan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, untuk itu hipotesis yang diajukan adalah:

H₇: Latar belakang keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa karakteristik *corporate governance* mempengaruhi manajemen laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Xie *et. al.* (2003) menemukan bahwa dewan dengan frekuensi rapat dan jumlah komisaris independen yang lebih banyak, dan jumlah anggota komite audit dengan jumlah rapat yang lebih banyak dapat mengurangi praktik manajemen laba. Namun, tidak semua manajemen laba bermakna negatif yang dilakukan dengan manipulasi dan dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Salah satu bentuk manajemen laba tanpa harus melakukan manipulasi adalah melalui pengurangan atau efisiensi beban pajaknya melalui manajemen pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Dhaliwal *et. al.* (2003) menyebutkan bahwa beban pajak perusahaan digunakan untuk mencapai laba yang diinginkan. Manajemen pajak ada beberapa cara, diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan banyak melakukan kedua cara tersebut untuk memperoleh laba yang diinginkan, walaupun sebenarnya penggelapan pajak merupakan cara yang ilegal dan bertentangan dengan undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan bentuk pengurangan jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara ini dianggap tidak menyalahi undang-undang pajak yang berlaku. Untuk mengukur penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menggunakan tarif pajak efektif (TPE) atau *Effective Tax Rates (ETR)*. Dyreng *et. al.* (2007) mengukur penghindaran pajak dalam jangka panjang dengan *ETR*. Cook *et. al.* (2006) menyebutkan bahwa perubahan *ETR* dapat mengindikasikan adanya manajemen laba. Untuk mencegah praktik manajemen laba yang dapat merugikan pengguna informasi laporan keuangan diperlukan penerapan *good corporate governance* yang di dalamnya termasuk dewan komisaris dan komite audit agar pengelolaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

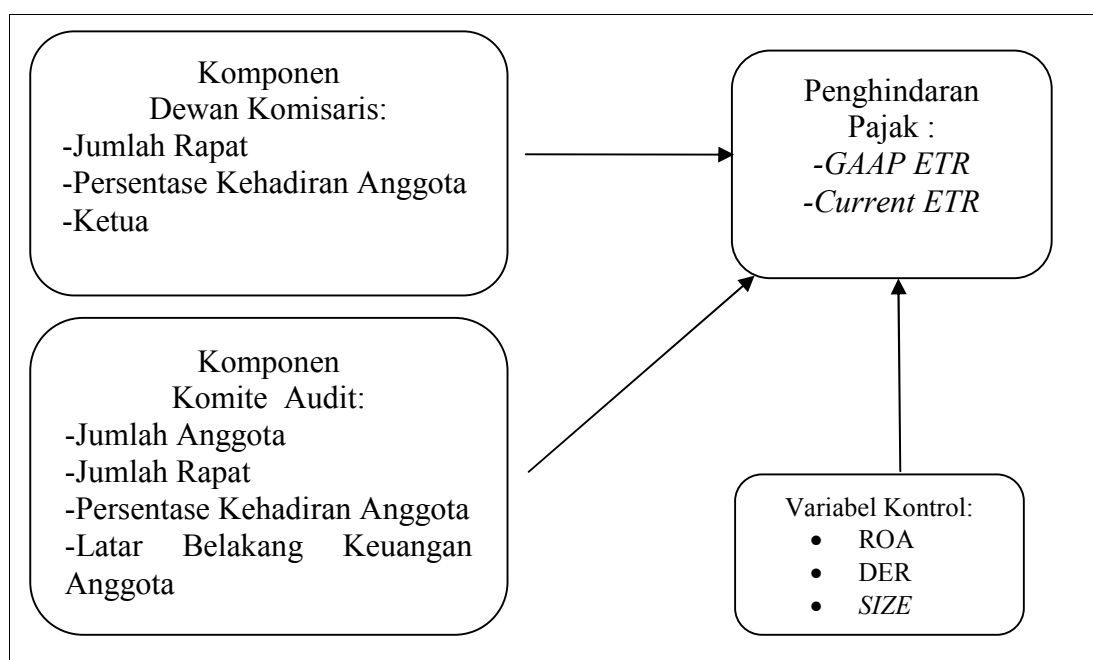
Bernad (2011) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *ETR* berdasarkan beban pajak dan berpengaruh negatif terhadap *ETR* berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Selain itu persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *ETR* baik berdasarkan beban pajak maupun pajak yang dibayarkan.

Kuatnya *corporate governance* juga ditentukan oleh komite audit, Dhaliwal *et. al.* (2006) menyimpulkan bahwa kuatnya komite audit yang diukur dari frekuensi rapat komite, independensi, dan jumlah anggota dalam komite audit.

Dalam penelitian ini menguji 2 faktor yang mempengaruhi *ETR*, yaitu yang pertama adalah dewan komisaris dan yang kedua adalah komite audit, sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, yaitu *ROA*, *DER*, dan *Size*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *GAAP ETR* dan *Current ETR*. Berikut ini merupakan gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini:

Gambar 3.1 Gambar Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Olah Data Penulis

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan (*field study*) karena penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur tanpa mempengaruhi kegiatan kerja di perusahaan dan studi pustaka (*literature study*) dengan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dimana data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2003). Data sekunder pada penelitian ini berasal dari *annual report* perusahaan yang terkait dengan informasi ekonomi dan keuangan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini juga digunakan sebagai sumber informasi lain.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam industri non keuangan yang *listed* dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2010. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian kali ini adalah metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja karena tujuan tertentu, dimana cara pengambilan sampel melalui beberapa kriteria. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sampel penelitian merupakan perusahaan-perusahaan dalam industri non keuangan yang *listed* di BEI dalam rentang waktu tahun 2009-2010.
2. Sampel hanya dari perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
3. Sampel perusahaan yang telah menerbitkan *annual report* yang lengkap yang telah diaudit selama periode 2009-2010.
4. *ETR* harus bernilai positif dan tidak boleh lebih dari satu.

3.4 Model Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan 2 variabel tidak terikat (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan yang termasuk sebagai variabel bebas adalah dewan komisaris dan komite audit. Berikut adalah persamaan yang dibentuk dalam penelitian ini :

Model 1

$$GAAP_ETR_{it} = \alpha_1 + \beta_1 B_MEET_{it} + \beta_2 B_ATTEND_{it} + \beta_3 B_HEAD_{it} + \beta_4 AU_QUANTITY_{it} + \beta_5 AU_MEET_{it} + \beta_6 AU_ATTEND_{it} + \beta_7 AU_FINEXP_{it} + \beta_8 ROA_{it} + \beta_9 DER_{it} + \beta_{10} SIZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dan

Model 2

$$Current_ETR_{it} = \alpha_1 + \beta_1 B_MEET_{it} + \beta_2 B_ATTEND_{it} + \beta_3 B_HEAD_{it} + \beta_4 AU_QUANTITY_{it} + \beta_5 AU_MEET_{it} + \beta_6 AU_ATTEND_{it} + \beta_7 AU_FINEXP_{it} + \beta_8 ROA_{it} + \beta_9 DER_{it} + \beta_{10} SIZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

<i>GAAP_ETR</i>	: <i>ETR</i> menurut beban pajak total
<i>Current_ETR</i>	: <i>ETR</i> menurut pajak yang dibayar atau pajak kini
<i>B_MEET</i>	: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
<i>B_ATTEND</i>	: Persentase Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
<i>B_HEAD</i>	: Ketua Dewan Komisaris
<i>AU_QUANTITY</i>	: Jumlah Anggota Komite Audit
<i>AU_MEET</i>	: Frekuensi Rapat Komite Audit
<i>AU_ATTEND</i>	: Persentase Kehadiran Anggota Komite Audit
<i>AU_FINEXP</i>	: Latar Belakang Keuangan Komite Audit
<i>ROA</i>	: <i>Return On Asset</i>
<i>DER</i>	: <i>Debt to Equity Ratio</i>
<i>SIZE</i>	: Ukuran Perusahaan
ε	: <i>Error</i>

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti untuk memahami dan membuat variabel dependen, menjelaskan variabilitasnya (keanekaragaman) atau memprediksinya. Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Bernad (2011) mengukur penghindaran pajak menggunakan *GAAP ETR* dan *Current ETR*, dimana *ETR* atau Tarif Pajak Efektif (TPE) adalah alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran pajak yang merupakan salah satu jenis manajemen pajak.

GAAP ETR merupakan *ETR* yang diukur berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan, sedangkan *current ETR* diukur berdasarkan beban pajak kini perusahaan yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

GAAP ETR dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang dilakukan oleh Dyreng *et. al.* (2007) dan *Current ETR* menggunakan rumus yang dipergunakan oleh Derashid dan Zhang (2003), yaitu:

$$GAAP\ ETR = \frac{Tax\ expense}{Pretax\ Income}$$

$$Current\ ETR = \frac{Current\ tax\ expense}{Pretax\ Income}$$

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif ataupun negatif. Jika terdapat variabel dependen, maka variabel independen juga ada, dan dengan setiap kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel dependen. Dengan kata lain, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan komite audit, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dalam Rapat Dewan Komisaris

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris salah satunya ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris. Aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat diukur dari seberapa sering dewan komisaris melakukan rapat dan persentase kehadiran anggota dewan dalam rapat tersebut. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris diberi simbol B_MEET, sedangkan variabel persentase tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat diberi simbol B_ATTEND dan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rata-rata tingkat kehadiran setiap anggota dalam rapat dewan komisaris}}{\text{Total jumlah anggota dewan komisaris}}$$

2. Ketua Dewan Komisaris

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan faktor yang penting dalam mencegah kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan juga mengawasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan komisaris adalah ketua dewan komisaris, apakah ketua dewan komisaris merupakan pihak independen atau bukan. Variabel ini merupakan variabel *dummy*, dimana angka 1 menunjukkan bahwa yang menjadi ketua dewan komisaris adalah komisaris independen, sedangkan angka 0 bukan komisaris independen. Pada penelitian ini variabel ketua dewan komisaris diberi simbol B_HEAD.

3. Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan dalam melaksanakan kewajiban mereka, terutama yang berhubungan dengan pengendalian internal

perusahaan dan pelaporan informasi keuangan sekaligus memberikan saran-saran yang bermanfaat. Efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya juga ditentukan oleh aktifitas komite audit yang diukur dari frekuensi atau jumlah rapat yang dilakukan komite audit dan persentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit. Dalam penelitian ini variabel frekuensi rapat komite audit diberi simbol AU_MEET yang diukur dari berapa jumlah rapat yang dilakukan dalam setahun dan variabel persentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit diberi simbol AU_ATTEND yang diukur dari:

Jumlah rata-rata tingkat kehadiran setiap anggota dalam rapat komite audit/Total jumlah anggota komite audit

4. Jumlah Anggota Komite Audit

Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, *corporate governance* harus baik agar praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak melewati batas dan melanggar undang-undang, namun tetap efektif dan efisien. Baik atau tidaknya *corporate governance* yang dijalankan perusahaan juga ditentukan oleh jumlah anggota komite audit. Variabel jumlah anggota komite audit dalam penelitian ini diberi simbol AU_QUANTITY dan diukur melalui berapa jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

5. Latar Belakang Keuangan Komite Audit

Latar belakang di bidang keuangan dan/atau akuntansi yang dimiliki anggota komite audit dianggap lebih mengerti mengenai kecurangan-kecurangan dalam keuangan perusahaan dan laporan keuangannya. Komite audit yang memiliki latar belakang keuangan dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya. Variabel latar belakang komite audit dalam penelitian ini diberi simbol AU_FINEXP dan diukur melalui :

Jumlah anggota yang memiliki latar belakang keuangan/Jumlah anggota komite audit.

3.5.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan sebagai pengendali pada pengujian dalam penelitian ini. Variabel kontrol yang digunakan terkait dengan praktik penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. *Return On Asset* (ROA)

ROA atau tingkat pengembalian aset diukur dengan membagi *net income* dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

2. *Debt To Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio diukur dengan menggunakan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total equity}}$$

3. *SIZE*

Size atau ukuran perusahaan dapat diukur dengan membagi *natural logarithm* dengan *total assets*, sehingga semakin tinggi *total assets* perusahaan semakin besar tingkat hutangnya.

$$SIZE = \text{LN}(\text{Total Asset})$$

3.5.4 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini ingin melihat hubungan antara variabel independen yang berupa dewan komisaris dan komite audit dengan variabel dependen berupa penghindaran pajak dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara *time-series* dan *cross sectional* karena menggunakan data dari banyak perusahaan dan lebih dari satu tahun perusahaan sebagai sampel penelitian. Model penelitian ini akan menggunakan model regresi karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Metode PLS digunakan agar model penelitian bebas dari

multikorelasi dan autokorelasi sehingga bersifat *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Data Panel memiliki tiga model yaitu:

1. Metode *Common-Constant* (*The Pooled OLS Method*)

Dalam mengolah data panel, metode ini adalah yang paling sederhana. Pada metode ini setiap perusahaan diasumsikan memiliki *slope* dan koefisien yang sama. Metode ini memiliki α yang konstan dan sama dalam setiap data *cross section*. Pada metode ini menggunakan metode kuadrat terkecil yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool* yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*.

2. Metode *Fixed Effect* (FEM)

Koefisien regresi dalam metode ini dianggap tetap antar *cross section* dan *time series*. Namun *intercept* pada model regresi berbeda antar *cross section* atau individu namun sama antar *time series*. Untuk menentukan perbedaan *intercept*nya dapat menggunakan variabel *dummy*, atau dapat juga disebut teknik *Least Squares Dummy Variabel* (*LSDV*). Namun, metode ini juga memiliki kelemahan yaitu berkurangnya *degree of freedom* yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi parameter.

3. Metode *Random Effect* (REM)

Untuk mengatasi kekurangan berupa berkurangnya efisiensi parameter pada metode *fixed affect*, maka dapat menggunakan variabel eror (*error terms*) dimana perbedaan karakteristik setiap individu dengan waktu dapat diatasi dengan model eror. Model eror dapat menghemat dan tidak mengurangi jumlah *degree of freedom* seperti yang terjadi pada model *fixed effect*. Metode *random effect* terdiri dari variabel eror yang terdiri dari 2 komponen, yaitu 1). Variabel eror secara menyeluruh yang merupakan kombinasi dari *time series* dan *cross section*, dan 2). Variabel eror secara individu.

3.6 Metode Pengujian Asumsi Klasik

Untuk dapat menilai hipotesis maka diperlukan model regresi yang baik dan tidak bias melalui uji statistik. Model regresi tersebut harus bebas dari multikorelasi, heterokedasitas, dan autokorelasi. Model regresi harus bersifat *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*). Model yang bersifat *BLUE* yaitu model yang bersifat linear, tidak bias dan efisien. Untuk menghasilkan estimasi yang memenuhi kriteria *BLUE* maka asumsi dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nilai harapan rata-rata kesalahan adalah nol.
2. Variansnya tetap (*homokedasticity*).
3. Tidak ada hubungan antara variable bebas dan *error term*.
4. Tidak ada korelasi serial antara *error* (*no-autocorrelation*).

Untuk pengujian dalam penelitian ini maka digunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

1. Uji Heterokedasitas (*Heterocedasticity*)

Pengujian heterokedasitas pada persamaan regresi dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan atau perbedaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya pada suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi dimana semua *residual* atau eror mempunyai *varians* yang sama dalam suatu model penelitian atau dengan kata lain bersifat homokedastisitas. Jika terdapat heterokedasitas dalam model ini, maka *varians* tidak sama atau *error* tidak konsisten sehingga hasil pengujian regresi akan menghasilkan estimasi yang bias. Pada umumnya, data yang sering mengandung heterokedasitas adalah data *cross section* karena data tersebut merupakan data yang berbeda-beda atau tidak sama.

Dalam menguji adanya heterokedasitas dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain : uji park, uji heterokedasitas *white*, dan metode grafik. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Eviews 6*.

2. Uji Multikolinieritas (*Multicollinearity*)

Uji multikorelasi dilakukan untuk menguji apakah ada gejala hubungan linear yang signifikan antar variabel independen yang terdapat pada model regresi, jika ada hubungan linear yang signifikan akan mempersulit dalam

menjelaskan variabel independen secara jelas. Pada model regresi yang baik seharusnya diantara variabel bebas tidak memiliki hubungan linear yang signifikan atau tingkat multikorelasi harus rendah, karena jika tingkat multikorelasi tinggi maka model regresi menjadi tidak bias. Multikorelasi ada jika nilai mutlak koefisien korelasi antar variabel lebih besar dari 0,8, sedangkan apabila koefisien korelasinya lebih kecil dari 0,8 maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari multikorelasi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel *residual* pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik harus bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui apakah ada autokorelasi pada suatu model regresi dapat menggunakan metode *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* (DW) sering digunakan dan dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS atau *Eviews*. Apabila statistik DW mendekati 2 maka dianggap tidak terdapat autokorelasi, apabila nilai DW berada antara 1,5 sampai 2,5 maka diduga tidak terdapat autokorelasi.

3.7 Pengujian Hipotesis

Selain melakukan uji asumsi klasik, penelitian ini juga menggunakan uji F untuk menentukan signifikansi variabel, serta uji *adjusted R²* untuk menentukan korelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen :

1. Uji F (Uji Signifikansi Linear Berganda)

Uji F dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hipotesis pada uji F ini adalah:

H_0 = Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (yang dilakukan secara bersamaan)

H_1 = Variabel Independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (yang dilakukan secara bersamaan)

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka tolak H_0 yang diartikan bahwa variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen, dan sebaliknya jika F hitung $<$ F tabel, maka terima H_0 yang artinya bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji *Adjusted R*²

Uji *adjusted R*² dilakukan untuk melihat secara lebih jelas seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi atau keragaman yang terdapat pada variabel dependen. Dengan melakukan pengujian *adjusted R*², maka dapat diketahui baik atau tidaknya model regresi pada suatu penelitian. Nilai *adjusted R*² berkisar antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin nilai tersebut mendekati 1 maka model regresi akan semakin baik.

3. Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan masing-masing variabel independen apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah:

$H_0: \beta = 0$ (Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_1: \beta \neq 0$ (Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen)

Dimana :

-Jika t-statistik $>$ t tabel _($\alpha/2, n-k-1$) maka tolak H_0 .

-Jika t-statistik $<$ t tabel _($\alpha/2, n-k-1$) maka H_0 diterima.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2010. Sampel harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan-perusahaan dalam industri perbankan dan keuangan, sedangkan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 123.

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Total perusahaan non keuangan yang <i>listed</i> di BEI tahun 2009-2010, yang menjadi populasi dalam penelitian ini	348
Jumlah perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan dalam <i>annual report</i> yang dibutuhkan dalam penelitian ini	(167)
Total perusahaan yang tidak memiliki <i>Current ETR</i> dan <i>GAAP</i>	(7)
Total perusahaan dengan <i>Current ETR</i> dan <i>GAAP ETR</i> negatif	(34)
Total perusahaan yang menggunakan mata uang asing	(17)
Jumlah Perusahaan	123
Jumlah tahun penelitian	2
Jumlah total yang dijadikan sampel penelitian	246

Perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam industri non keuangan. Dalam penelitian ini tidak mengikutsertakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perbankan dan keuangan karena mempunyai karakteristik yang berbeda.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif Model Pertama

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dalam mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan rata-rata (*mean*) dan

standar deviasi. Batas minimum dan batas maksimum juga akan dilakukan terhadap variabel yang akan diregresi.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	Rata-Rata	Standar Deviasi	Batas Minimum	Batas Maksimum
GAAP_ETR?	0.261505	0.124982	0.003107	0.824653
CURRENT_ETR	0.293300	0.121860	0.003080	0.846491
B_MEET	6.878049	6.067761	1.000000	45.00000
B_ATTEND	0.942629	0.100166	0.333333	1.000000
B_HEAD	0.268293	0.443974	0.000000	1.000000
AU_QUANTITY	3.203252	0.510452	3.000000	5.000000
AU_MEET	8.203252	7.907072	1.000000	4.800000
AU_ATTEND	0.956841	0.088170	0.575000	1.000000
AU_FINEXP	0.799146	0.203466	0.250000	1.000000
ROA	0.085302	0.080958	-0.002806	0.406695
DER	1.309044	1.274025	0.065520	1.015777
SIZE	2.824906	1.509367	2.496867	3.235714

Sumber : *Eviews* (diolah oleh penulis)

Pada tabel 4.2, nilai minimum *GAAP ETR* sebesar 0,003107 menunjukkan bahwa besarnya kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dan nilai maksimum sebesar 0,824653 yang mengindikasikan bahwa semakin kecilnya kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Nilai *mean* atau rata-rata sebesar 0,261505 menunjukkan bahwa tingginya kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Nilai minimum 0,003080 pada *current ETR* menunjukkan bahwa *current ETR* dalam penelitian ini memiliki nilai terkecil sebesar 0,003080 yang mengindikasikan tingginya kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,846491 menunjukkan bahwa nilai *current ETR* pada penelitian ini memiliki nilai terbesar sebesar 0,846491 yang mengindikasikan semakin kecilnya peluang adanya penghindaran pajak dan nilai

rata-rata *current ETR* pada penelitian ini adalah sebesar 0,293300, hal ini menunjukkan bahwa potensi penghindaran pajak pada perusahaan cukup tinggi.

Pada B_MEET, nilai minimum sebesar 1 menunjukkan bahwa dalam satu tahun paling sedikit dewan komisaris melakukan 1 kali rapat dan nilai maksimum sebesar 45 menunjukkan bahwa dewan komisaris paling banyak melakukan 45 kali pertemuan dalam 1 tahun. Nilai *mean* sebesar 6,878649 pada B_MEET menunjukkan bahwa rata-rata rapat dewan komisaris yang dilakukan dalam 1 tahun adalah 6 kali.

Pada B_ATTEND, nilai minimum sebesar 0,33333 menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris paling sedikit dihadiri 33% anggotanya, sedangkan nilai maksimum 1 menunjukkan bahwa seluruh anggota menghadiri rapat dewan komisaris. Nilai *mean* sebesar 0,942629 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran anggota dalam rapat dewan komisaris adalah sebesar 94%.

Nilai minimum pada B_HEAD sebesar 0 menunjukkan bahwa yang menjadi ketua komisaris atau komisaris utama bukan merupakan komisaris independen dan nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa yang menjadi ketua dewan komisaris adalah komisaris independen. Nilai *mean* sebesar 0,269293 menunjukkan bahwa rata-rata yang menjadi ketua dewan komisaris bukan merupakan pihak independen.

AU_QUANTITY memiliki nilai minimum sebesar 3 yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit termasuk ketua paling sedikit berjumlah 3 orang dan nilai maksimum sebesar 5 yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit termasuk ketua berjumlah 5 orang. Nilai *mean* atau rata jumlah anggota komite audit termasuk ketua adalah sebesar 3,203252.

Nilai minimum sebesar 1 pada AU_MEET menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit paling sedikit adalah 1 kali, sedangkan nilai maksimum sebesar 48 menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit yang dilakukan dalam penelitian ini paling banyak adalah 48 kali. *Mean* sebesar 8,203252 menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit yang dilakukan rata-rata adalah 8 kali pertemuan.

Nilai minimum AU_ATTEND sebesar 0,575000 menunjukkan bahwa persentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit paling sedikit adalah 57,5% dan nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa seluruh anggota hadir dalam rapat komite audit. *Mean* sebesar 0,956841 menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit rata-rata adalah sebesar 95%.

Pada AU_FINEXP, nilai minimum sebesar 0,25000 menunjukkan bahwa persentase jumlah komite audit yang memiliki latar belakang keuangan dalam perusahaan pada penelitian ini paling sedikit adalah 25% dan nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa seluruh anggota komite audit memiliki latar belakang keuangan. Nilai *mean* sebesar 0,799146 menunjukkan bahwa rata-rata anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan adalah 79%.

ROA, DER, dan *Size* merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. ROA memiliki nilai *mean* atau rata-rata sebesar 0,085302 dan standar deviasi sebesar 0,080958, DER memiliki *mean* atau nilai rata-rata sebesar 1,309044 dan standar deviasi sebesar 1,274025, sedangkan *Size* menunjukkan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 2,824906 dan standar deviasi sebesar 1,509367.

4.3 Pemilihan Model Estimasi Model Pertama

Pada penelitian ini cara untuk menentukan model estimasi yang dipilih dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan PLS, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Dalam memilih metode yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah dengan melakukan uji chow dan uji haussman.

4.3.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan dengan melihat berapa nilai F-Prob pada penelitian ini dengan menggunakan hipotesis:

H_0 : Model *pooled least squared*

H_1 : Model *fixed effect*

Apabila nilai F-Prob lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 dan menerima model *fixed effect* dan begitu juga sebaliknya apabila F-Prob lebih besar dari 0,05 maka terima H_0 dan menerima model PLS.

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.3, F-Prob menunjukkan sebesar 0,00000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 dan menggunakan model *fixed effect*.

Tabel 4.3 Uji Chow Model Pengujian Pertama

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.943189	(122,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	408.263524	122	0.0000

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

4.3.2 Uji Haussman

Uji kedua yang dilakukan adalah uji haussman, dimana hipotesis dalam uji haussman adalah:

H_0 : Model *random effect*

H_1 : Model *fixed effect*

Apabila nilai F-Prob lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 dan menerima model *random effect*, sedangkan apabila F-Prob lebih besar dari 0,05 maka menerima model *random effect*.

Berdasarkan tabel di 4.4 dimana nilai F-Prob sebesar 0,1103 atau lebih besar dari 5%, maka terima H_0 dan menggunakan model *random effect*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji haussman pada tabel 4.4, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *random effect*.

Tabel 4.4
Uji Haussman Model Pengujian Pertama

Cross-section random	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	15.642079	10	0.1103

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

4.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah untuk menentukan apakah model penelitian ini sudah bersifat *BLUE* atau belum. Untuk mengujinya maka dilakukan pengujian heterokedasitas, autokorelasi dan multikorelasi.

Tabel 4.5 Hasil Regresi Model Pertama

Variable	Coefficient	Prob. (1-tail)	Prob (2-tail)
B_MEET	0.001344	0.4276	0.21380
B_ATTEND	-0.061672	0.4410	0.22050
B_HEAD	0.002676	0.8981	0.44905
AU_QUANTITY	-0.032466	0.1380	0.06900***
AU_MEET	0.000213	0.8761	0.43805
AU_ATTEND	-0.323843	0.0014	0.00070*
AU_FINEXP	-0.013374	0.7840	0.39200
ROA	-0.278948	0.0166	0.00830*
DER	0.005861	0.3878	0.19390
SIZE	-0.012715	0.0711	0.03555**
R-squared	0.094329		
Adjusted R-squared	0.055789		
Prob(F-statistic)	0.008512		
Durbin-Watson stat	2.078291		

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

*, **, *** menunjukkan pada tingkat signifikansi alpha 1%, 5%, dan 10%

4.4.1 Uji Heterokedasitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada gejala heterokedasitas dalam suatu model penelitian. Jika terdapat heterokedasitas dalam model ini, maka *varians* tidak sama atau *error* tidak konsisten. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program *Eviews* 6. Karena model ini menggunakan *random effect*, maka masalah heterokedasitas telah teratasi (Gujarati).

4.4.2 Uji Autokorelasi

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan cara metode *durbin-watson*. Apabila nilai *durbin-watson* pada penelitian ini berkisar pada 1,5 sampai dengan 2,5, maka dapat dikatakan model penelitian tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

Berdasarkan tabel di 4.5, nilai *durbin-watson* sebesar 2.078291 maka model penelitian ini dianggap bebas dari autokorelasi karena berada pada nilai antara 1,5 sampai dengan 2,5.

4.4.3 Uji Multikorelasi

Multikorelasi adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada di dalam model regresi. Untuk menguji adanya multikorelasi dalam model penelitian ini adalah dengan melihat korelasi dengan menggunakan *Eviews* 6, apabila ada korelasi lebih besar dari 0,8 maka model tersebut memiliki masalah multikorelasi, sedangkan apabila korelasi antara variabel independennya kurang dari 0,8 maka model tersebut bebas dari multikorelasi.

Berdasarkan tabel 4.6, tidak ada yang memiliki korelasi lebih dari 0,8 yang mengindikasikan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah multikorelasi.

4.5 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, pengujian ini dilakukan dengan melihat *F-statistic* pada model penelitian apakah lebih besar dari 5% atau lebih kecil dari

5%. Apabila nilai *F-statistic* lebih kecil dari 5%, maka variabel independen menentukan variabel dependen.

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa *F-statistic* sebesar 0.008512 atau lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini secara simultan dapat menjelaskan variabel independen.

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas Model Pertama

	GAAP_ETR	B_MEET	B_ATTEND	B_HEAD	AU_QUANTITY	AU_MEET	AU_ATTEND	AU_FINEXP	ROA	DER	SIZE
GAAP_ETR	1	0.017321	-0.057440	0.037865	-0.047200	-0.027123	-0.168672	0.046441	-0.118436	0.075302	-0.156813
B_MEET	0.017321	1	0.000812	-0.051440	0.193846	0.312225	0.021116	-0.054540	0.005427	0.048338	0.010136
B_ATTEND	-0.057440	0.000812	1	-0.026709	-0.167683	-0.052649	0.344241	-0.117579	-0.113553	0.057213	-0.059781
B_HEAD	0.037865	-0.051440	-0.026709	1	0.064574	-0.042339	-0.145822	0.125355	-0.068460	0.114908	-0.041188
AU_QUANTITY	-0.047200	0.193846	-0.167683	0.064574	1	0.458949	-0.501066	-0.175183	0.073404	0.080169	0.320831
AU_MEET	-0.027123	0.312225	-0.052649	-0.042339	0.458949	1	-0.276785	-0.043054	0.178932	-0.013080	0.277071
AU_ATTEND	-0.168672	0.021116	0.344241	-0.145822	-0.501066	-0.276785	1	-0.014022	-0.103167	-0.049915	-0.132934
AU_FINEXP	0.046441	-0.054540	-0.117579	0.125355	-0.175183	-0.043054	-0.014022	1	0.019111	0.037781	-0.167734
ROA	-0.118436	0.005427	-0.113553	-0.068460	0.073404	0.178932	-0.103167	0.019111	1	-0.184512	0.147275
DER	0.075302	0.048338	0.057213	0.114908	0.080169	-0.013080	-0.049915	0.037781	-0.184512	1	-0.013961
SIZE	-0.156813	0.010136	-0.059781	-0.041188	0.320831	0.277071	-0.132934	-0.167734	0.147275	-0.013961	1

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

4.6 Uji *Adjusted R*²

Uji *R*² dilakukan untuk menentukan apakah model penelitian ini layak digunakan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *adjusted R*², pada tabel 4.5 nilai *adjusted R*² adalah 0.055789 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 5% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.7 Uji Hipotesis Penelitian

4.7.1 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris (B_MEET) dan Persentase Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris (B_ATTEND) Terhadap Penghindaran Pajak (*GAAP ETR*)

Jumlah rapat dewan komisaris yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini memiliki koefisien positif sebesar 0.001344 dan tingkat signifikansi sebesar 0,2138. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *GAAP ETR*, hal ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga hipotesis H_1 ditolak. Hal ini sesuai dengan Mashayekhi (2008) dalam Shah *et. al.* (2009) yang mengatakan bahwa rapat dewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Salah satu bentuk manajemen laba adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar pendapatan perusahaan menjadi semakin besar atau agar kas yang dikeluarkan lebih kecil. Hal ini diduga karena dewan komisaris hanya mengawasi agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan benar dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, sedangkan kewenangan dalam masalah penghindaran pajak atas beban pajak lebih dipengaruhi pihak manajemen perusahaan yang dianggap lebih paham masalah pajak perusahaannya.

Tingkat kehadiran dewan komisaris memiliki koefisien negatif sebesar - 0.061672 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2205. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota dewan komisaris pada rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *GAAP ETR*, sehingga H_2 ditolak. Hal ini diduga bahwa anggota dewan komisaris belum mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan keputusan-keputusan mengenai beban pajak lebih dipengaruhi manajemen perusahaan atau dapat juga diduga dewan komisaris hanya mengawasi tanpa terlibat lebih jauh terhadap tindakan-tindakan manajemen perusahaan termasuk dalam hal perpajakannya.

4.7.2 Pengaruh Kepemimpinan Komisaris Independen (B_HEAD) Terhadap Terhadap Penghindaran Pajak (GAAP ETR)

Independensi ketua dewan komisaris memiliki koefisien positif sebesar 0.002676 dan tingkat signifikansi sebesar 0,44905, nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *GAAP ETR* yang mengindikasikan independensi ketua dewan komisaris tidak mempengaruhi penghindaran pajak, ini berarti hipotesis H_3 ditolak. Hal ini sesuai dengan Veronica dan Utama (2006) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan. Mengurangi beban pajak agar memperoleh laba yang lebih besar merupakan salah satu cara dalam mengelola laba. Hal ini diduga karena keberadaan komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan saja, sehingga kinerjanya tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan termasuk dalam hal perpajakan.

4.7.3 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit (AU_QUANTITY) Terhadap Penghindaran Pajak (GAAP ETR)

Jumlah anggota komite audit memiliki koefisien negatif -0.032466 dan tingkat signifikansi sebesar 0,069. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya jumlah anggota komite audit, maka semakin rendah *GAAP ETR* yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar, sehingga hipotesis H_4 diterima. Hal ini sejalan dengan Bradbury *et. al.* (2002) yang menemukan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap kualitas akuntansi. Hal ini diduga karena semakin banyaknya komite audit, membuat tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atas beban pajak dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak yang diberikan lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

4.7.4 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit (AU_MEET) dan Pengaruh Persentase Kehadiran Komite Audit (AU_ATTEND) Terhadap Penghindaran Pajak (GAAP ETR)

Nilai koefisien pada jumlah rapat komite audit bernilai positif sebesar 0.000213 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,43805. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *GAAP ETR*, sehingga hipotesis H_5 ditolak. Hal ini sejalan dengan Pamudji dan Trihartati (2008) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk memperoleh laba yang diinginkan. Jumlah rapat komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak diduga terjadi karena keputusan-keputusan mengenai besarnya pajak lebih dipengaruhi pengelola perusahaan yang dianggap lebih memahami masalah pajak perusahaannya, sedangkan komite audit lebih berperan kepada pengawasan dan memberikan saran kepada dewan komisaris atau mungkin dapat juga dikarenakan kewenangan dari komite audit dibatasi oleh dewan komisaris.

Nilai koefisien tingkat kehadiran komite audit yang bernilai negatif sebesar -0.323843 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0007, yang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota komite audit yang semakin tinggi dalam rapat maka *GAAP ETR* yang dilakukan perusahaan juga menurun yang mengindikasikan penghindaran pajak meningkat, sehingga hipotesis H_6 diterima. Hal ini sejalan dengan Xie *et. al.* (2003) yang mengatakan bahwa rapat dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba atau pengelolaan laba. Salah satu cara mengelola laba adalah dengan mengelola pajak melalui penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi persentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit maka tingkat koordinasi pengawasan juga meningkat yang mendorong perusahaan agar lebih efektif dalam masalah beban pajak dan saran yang diberikan lebih berkualitas sehingga penghindaran pajak yang dilakukan lebih efektif, selain itu tingginya persentase kehadiran juga membuat komunikasi juga meningkat.

4.7.5 Pengaruh Latar Belakang Keuangan Anggota Komite Audit (AU_FINEXP) Terhadap Penghindaran Pajak (GAAP ETR)

Nilai koefisien pada variabel latar belakang keuangan komite audit memiliki nilai koefisien yang negatif sebesar -0.013374 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,392$. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *GAAP ETR* yang diindikasikan tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga hipotesis H_7 ditolak. Sesuai dengan Garven (2009) yang menyatakan bahwa latar belakang keuangan anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu jenis pengelolaan laba yang sering dilakukan perusahaan agar pendapatan perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini diduga karena informasi-informasi yang diperoleh komite audit kurang memadai, sehingga efektivitas komite audit menjadi berkurang atau dapat juga diduga bahwa pembentukan komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku. Selain itu, masalah pajak merupakan masalah yang kompleks sehingga mungkin keahlian di bidang keuangan dan akuntansi saja belum cukup, sehingga membutuhkan keahlian dalam bidang perpajakan untuk dapat menyelesaikan masalah pajak.

4.7.6 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Penghindaran Pajak (GAAP ETR)

Variabel kontrol ROA memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.278948 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0083$ yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *GAAP ETR*. Hal ini sesuai dengan Lestari (2010) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif. Menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga besar yang dapat dilihat dari menurunnya nilai *GAAP ETR*.

DER untuk mengukur *leverage* memiliki koefisien positif sebesar 0.005861 dan tingkat signifikansi sebesar $0,1939$ yang menunjukkan bahwa DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini

sejalan dengan dengan Lestari (2010) yang menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap TPE.

Variabel kontrol *Size* memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,012715 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,03555, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, maka *GAAP ETR* semakin kecil yang mengindikasikan meningkatnya penghindaran pajak menurut akuntansi yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Bernad (2011) yang menemukan bahwa *Size* berpengaruh negatif terhadap *GAAP ETR*. Hal ini diduga terjadi karena semakin besar perusahaan, maka kemampuan mereka untuk mempekerjakan seseorang atau memanfaatkan jasa konsultan pajak juga semakin besar dimana hal tersebut dapat meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4.8 Pemilihan Model Estimasi Model Kedua

Pada penelitian ini cara untuk menentukan model estimasi yang dipilih dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan PLS, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Dalam memilih metode yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah dengan melakukan uji chow dan uji haussman.

4.8.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan dengan melihat berapa nilai F-Prob pada penelitian ini dengan menggunakan hipotesis:

H_0 : Model *pooled least squared*

H_1 : Model *fixed effect*

Apabila nilai F-Prob lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 dan menerima model *fixed effect* dan begitu juga sebaliknya apabila F Prob lebih besar dari 0,05 maka terima H_0 dan menerima model PLS.

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.7 dimana F-Prob sebesar 0,00000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 dan menggunakan model *fixed effect*.

Tabel 4.7 Uji Chow Model Kedua

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.542964	(122,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	324.856602	122	0.0000

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)**4.8.2 Uji Haussman**

Uji kedua yang dilakukan adalah uji haussman, dimana hipotesis dalam uji haussman adalah:

$$H_0: \text{Model } \textit{random effect}$$

$$H_1: \text{Model } \textit{fixed effect}$$

Apabila nilai F-Prob lebih kecil dari 0,05 maka tolak H_0 dan menerima model *random effect*, sedangkan apabila F-Prob lebih besar dari 0,05 maka menerima model *random effect*.

Tabel 4.8 Uji Haussman Model Kedua

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.087.939	10	0.0535

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 4.8, nilai F-Prob menunjukkan sebesar 0,0535 atau lebih besar dari 0,05, maka terima H_0 dan menggunakan model *random effect*.

Berdasarkan hasil uji chow dan uji haussman pada tabel di atas, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *random effect*.

4.9 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah untuk menentukan apakah model penelitian ini sudah bersifat *BLUE* atau belum. Untuk mengujinya maka dilakukan pengujian heterokedasitas, autokorelasi dan multikorelasi.

Tabel 4.9 Hasil Regresi Model Kedua

Variable	Coefficient	Prob. (1-tail)	Prob (2-tail)
B_MEET	0.000683	0.6657	0.33285
B_ATTEND	-0.068572	0.4071	0.20355
B_HEAD	0.003894	0.8458	0.4229
AU_QUANTITY	0.007992	0.7094	0.3547
AU_MEET	-0.000585	0.6554	0.3277
AU_ATTEND	0.011911	0.9098	0.4549
AU_FINEXP	-0.073835	0.1073	0.05365***
ROA	-0.398636	0.0004	0.0002*
DER	0.005644	0.3998	0.1999
SIZE	-0.010782	0.098	0.049**
R-squared	0.090047		
AdjustedRsquared	0.051325		
Prob(F-statistic)	0.012544		
Durbin-Watson stat	2.105359		

*, **, *** Menunjukkan tingkat signifikansi alpha 1%, 5%, dan 10%

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

4.9.1 Uji Heterokedasitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada gejala heterokedasitas dalam suatu model penelitian. Jika terdapat heterokedasitas dalam model ini, maka *varians* tidak sama atau *error* tidak konsisten. Pengujian ini dilakukan

dengan menggunakan program *Eviews 6*. Karena model ini menggunakan *random effect*, maka masalah heterokedasitas telah teratasi (Gujarati).

4.9.2 Uji Autokorelasi

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan cara metode *durbin-watson*. Apabila nilai *durbin watson* pada penelitian ini berkisar pada 1,5 sampai dengan 2,5 maka model penelitian tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* menunjukkan sebesar 2.105359, sehingga model penelitian ini bebas dari autokorelasi.

4.9.3 Uji Multikorelasi

Tabel 4.10 Uji Multikorelasi Model Kedua

	CURRENT_ETR	B_MEET	B_ATTEND	B_HEAD	AU_QUANTITY	AU_MEET	AU_ATTEND	AU_FINEXP	ROA	DER	SIZE
CURRENT_ETR	1	0.022306	0.006085	0.043967	0.006768	-0.087593	0.000597	-0.094725	-0.251769	0.089724	-0.130332
B_MEET	0.022306	1	0.000812	-0.051440	0.193846	0.312225	0.021116	-0.054540	0.005427	0.048338	0.010136
B_ATTEND	0.006085	0.000812	1	-0.026709	-0.167683	-0.052649	0.344241	-0.117579	-0.113553	0.057213	-0.059781
B_HEAD	0.043967	-0.051440	-0.026709	1	0.064574	-0.042339	-0.145822	0.125355	-0.068460	0.114908	-0.041188
AU_QUANTITY	0.006768	0.193846	-0.167683	0.064574	1	0.458949	-0.501066	-0.175183	0.073404	0.080169	0.320831
AU_MEET	-0.087593	0.312225	-0.052649	-0.042339	0.458949	1	-0.276785	-0.043054	0.178932	-0.013080	0.277071
AU_ATTEND	0.000597	0.021116	0.344241	-0.145822	-0.501066	-0.276785	1	-0.014022	-0.103167	-0.049915	-0.132934
AU_FINEXP	-0.094725	-0.054540	-0.117579	0.125355	-0.175183	-0.043054	-0.014022	1	0.019111	0.037781	-0.167734
ROA	-0.251769	0.005427	-0.113553	-0.068460	0.073404	0.178932	-0.103167	0.019111	1	-0.184512	0.147275
DER	0.089724	0.048338	0.057213	0.114908	0.080169	-0.013080	-0.049915	0.037781	-0.184512	1	-0.013961
SIZE	-0.130332	0.010136	-0.059781	-0.041188	0.320831	0.277071	-0.132934	-0.167734	0.147275	-0.013961	1

Sumber: *Eviews* (diolah oleh penulis)

Multikorelasi adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada di dalam model regresi. Untuk menguji adanya multikorelasi dalam model penelitian ini adalah dengan melihat korelasi dengan menggunakan *Eviews 6*, apabila ada korelasi lebih besar dari 0,8

maka model tersebut memiliki masalah multikorelasi, sedangkan apabila korelasi antara variabel independennya kurang dari 0,8 maka model tersebut bebas dari multikorelasi

Berdasarkan tabel di 4.10, tidak ada yang memiliki korelasi lebih dari 0,8 yang mengindikasikan bahwa model penelitian bebas dari masalah multikorelasi.

4.10 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, pengujian ini dilakukan dengan melihat *F-statistic* pada model penelitian apakah lebih besar dari 5% atau lebih kecil dari 5%. Apabila nilai *F-statistic* lebih kecil dari 5%, maka variabel independen menentukan variabel dependen.

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa *F-statistic* sebesar 0.012544 atau lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian secara simultan dapat menjelaskan variabel independen.

4.11 Uji *Adjusted R*²

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan apakah model penelitian ini layak digunakan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *adjusted R*², pada tabel 4.9 tersebut nilai *adjusted R*² adalah 0.051325 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 5,1% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.12 Uji Hipotesis Penelitian

4.12.1 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris (B_MEET) dan Persentase Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris (B_ATTEND) Terhadap Penghindaran Pajak (*Current ETR*)

Jumlah rapat dewan komisaris dalam penelitian ini memiliki koefisien positif sebesar 0.000683 dan tingkat signifikansi sebesar 0.33285 yang menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan, maka hipotesis H₁ ditolak. Hal ini sejalan dengan Mashayekhi (2008) dalam Shah *et. al.* (2009), yang mengatakan bahwa rapat dewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, namun hal ini tidak sejalan dengan Xie *et. al.* (2003) yang menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba. Salah satu bentuk manajemen laba adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar pendapatan perusahaan menjadi semakin besar atau jumlah kas yang dikeluarkan menjadi kecil. Hal ini diduga karena dewan komisaris hanya berfungsi mengawasi kinerja pengelola perusahaan tanpa terlibat lebih jauh dalam tindakan-tindakan yang dilakukan pengelola perusahaan terhadap masalah pajaknya atau dapat juga diduga karena rapat dewan komisaris tidak terlalu fokus hanya kepada masalah pajak, sedangkan masalah pajak memerlukan fokus yang cukup tinggi karena cukup kompleks dan jumlah pajak yang dibayar cenderung lebih dipercayai pengelola perusahaan yang dianggap lebih memahami masalah pajaknya.

Tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat memiliki koefisien negatif sebesar -0.068572 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,20355 yang mengindikasikan bahwa tingkat kehadiran anggota rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *current ETR* yang mengindikasikan bahwa persentase kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga hipotesis H₂ ditolak. Hal ini diduga karena dewan komisaris hanya mengawasi, selain itu rapat dewan komisaris tidak terlalu fokus hanya kepada masalah pajak, sedangkan masalah pajak memerlukan fokus yang cukup tinggi karena cukup kompleks dan jumlah pajak yang dibayar cenderung lebih dipercayai pengelola perusahaan yang dianggap lebih memahami masalah pajaknya. Selain itu, diduga bahwa dewan komisaris hanya mengawasi.

4.12.2 Pengaruh Kepemimpinan Komisaris Independen (B_HEAD) Terhadap Penghindaran Pajak (*Current_ETR*)

Kepemimpinan komisaris independen yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini memiliki koefisien positif sebesar 0.003894 dan tingkat signifikansi sebesar 0,4229. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa dewan

komisaris yang dipimpin oleh komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *current ETR* dimana hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak, oleh karena itu berarti hipotesis H₃ ditolak. Ini sejalan dengan penelitian Parulian (2004) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi pengelolaan laba perusahaan. Besar kecilnya laba juga ditentukan dengan besarnya pajak yang dibayar. Hal ini diduga bahwa faktor independensi seorang ketua dewan komisaris belum cukup untuk mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan atau dapat juga diduga bahwa adanya komisaris independen hanya untuk memenuhi regulasi saja, namun tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak efektif.

4.12.3 Pegaaruh Jumlah Anggota Komite Audit (AU_QUANTITY) Terhadap Penghindaran Pajak (*Current ETR*)

Pada penelitian ini jumlah anggota komite audit memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.007992 dan tingkat signifikansi sebesar 0,3547. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *current ETR* yang mengindikasikan bahwa jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga hipotesis H₄ ditolak. Hal ini sesuai dengan Sanjaya (2008) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penghindaran pajak merupakan salah satu jenis manajemen laba yang bertujuan agar laba yang diperoleh menjadi lebih besar. Hal ini diduga dapat terjadi karena pengawasan dan saran-saran yang diberikan komite audit masih kurang, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak perusahaan atau diduga karena komunikasi dengan pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris dan pihak-pihak terkait tidak berjalan lancar sehingga efektivitas komite audit masih kurang. Selain itu, diduga juga karena kewenangan komite audit juga dibatasi oleh dewan komisaris.

4.12.4 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit (AU_MEET) dan Pengaruh Persentase Kehadiran Komite Audit (AU_ATTEND) Terhadap Penghindaran Pajak (*Current ETR*)

Nilai koefisien pada jumlah rapat komite audit bernilai negatif sebesar - 0.000585 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,3277. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *current ETR* yang mengindikasikan bahwa jumlah rapat komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga hipotesis H₅ ditolak. Hal ini sejalan dengan Pamudji dan Trihartati (2008) yang menemukan bahwa rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam mengelola labanya agar laba yang dicapai lebih besar atau kas yang dikeluarkan lebih kecil. Jumlah rapat komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak diduga terjadi karena jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit belum cukup mempengaruhi penghindaran pajak atau diduga kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga belum mampu mempengaruhi penghindaran pajak.

Nilai koefisien tingkat kehadiran komite audit yang bernilai positif sebesar 0.011911 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,4549 yang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *current ETR* yang mengindikasikan persentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga menolak hipotesis H₆. Hal ini sejalan dengan Lin *et.al.* (2006) yang menemukan bahwa rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi manajemen laba. Memperkecil jumlah pajak melalui penghindaran pajak merupakan salah satu cara manajemen perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Hal ini diduga karena komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris sehingga wewenangnya dibatasi oleh dewan komisaris atau dapat juga diduga bahwa komunikasi komite audit dengan dewan komisaris maupun manajemen perusahaan tidak lancar.

4.12.5 Pengaruh Latar Belakang Keuangan Anggota Komite Audit (AU_FINEXP) Terhadap Penghindaran Pajak (*Current_ETR*)

Nilai koefisien pada variabel latar belakang keuangan komite audit memiliki nilai koefisien yang negatif sebesar -0.073835 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,05365$. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang keuangan komite audit memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap *current ETR* dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka *current ETR* semakin rendah yang mengindikasikan bahwa penghindaran pajak semakin besar. Hal ini dapat terjadi karena bidang perpajakan membutuhkan keahlian keuangan yang lebih mendalam untuk memahaminya. Hal ini sesuai dengan Bryan *et. al.* (2004) yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh komite audit adalah keahlian di bidang keuangan. Apabila anggota komite audit memiliki latar belakang keuangan termasuk pajak, maka komite audit dapat memberikan saran-saran yang berkualitas mengenai pajak yang dapat mempengaruhi pajak yang dibayar perusahaan atau beban pajak kini dalam melakukan penghindaran pajak.

4.12.6 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Penghindaran Pajak (*Current ETR*)

Variabel kontrol ROA memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.398636 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0002$ yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *current ETR*. Sejalan dengan Lestari (2010) yang menemukan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin besar yang diukur dari semakin kecilnya *current ETR*.

DER memiliki koefisien positif sebesar 0.005644 dan tingkat signifikansi sebesar $0,1999$ yang menunjukkan bahwa DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *current ETR*. Hal ini sejalan dengan Lestari (2010) yang menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap TPE.

Variabel kontrol *Size* memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,011086 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,049, hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap *current ETR*. Hal ini sesuai dengan Lestari (2010) yang menemukan bahwa *Size* berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif. Semakin besar perusahaan semakin kecil pula *current ETR*, maka kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan penghindaran pajak semakin besar, karena kemampuan untuk mempekerjakan orang yang ahli dalam bidang perpajakan atau menyewa konsultan pajak semakin besar.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menguji apakah dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar atau menghindari pengeluaran kas yang lebih besar dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan-perusahaan dalam industri non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memenuhi kriteria dalam melakukan penelitian ini, sehingga jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 123 perusahaan dari 348 perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui *GAAP ETR* maupun *current ETR*. Faktor komite audit yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah jumlah anggota dimana memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *GAAP ETR*, persentase kehadiran anggota komite audit dalam rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *GAAP ETR*, dan latar belakang anggota komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *current ETR*.

Faktor dewan komisaris dan komite audit hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sedangkan faktor lain yang mungkin dianggap memberikan pengaruh lebih besar terhadap penghindaran pajak adalah pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan perpajakan, selain itu faktor perekonomian negara dan dunia dapat juga memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan, diantaranya:

1. Rentang waktu periode yang diteliti hanya 2 tahun, sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan rentang waktu periode yang diteliti lebih panjang sehingga hasil yang didapat dari penelitian selanjutnya dapat lebih tepat dan akurat
2. Penelitian ini dilakukan hanya terhadap perusahaan dalam industri non keuangan yang *listed* di BEI, sehingga tidak menggambarkan pengaruh yang sama terhadap perusahaan-perusahaan lain selain industri non keuangan yang *listed* pada BEI dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di BEI yang mempunyai karakteristik berbeda.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar jumlah variabe ditambahkan, misalkan variabel Internal audit dan tahun yang diobservasi juga ditambahkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

5.3.2 Saran Untuk Perusahaan

Pada penelitian ini hanya terdapat beberapa faktor dari dewan komisaris dan komite audit yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, oleh karena itu sebaiknya rapat-rapat yang dilakukan dewan komisaris dapat lebih intensif dan memberikan perhatian lebih terhadap pajak perusahaan, serta anggota dewan komisaris dan komite audit dapat meningkatkan pengetahuannya dalam bidang perpajakan, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat berjalan efektif.

5.3.3 Saran Untuk Pemerintah

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan, pemerintah sebaiknya membuat peraturan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dapat diminimalisir dan pada akhirnya penerimaan negara juga meningkat.

5.3.4 Saran Untuk Investor dan Pengguna Informasi

Investor dan pengguna informasi laporan keuangan dapat mempertimbangkan faktor efisiensi pajak pada perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan atau investasi sehingga keputusan yang diambil tidak salah.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, Renee B. (2005). *What do Boards do? Evidence from Board Committee and Director Compensation Data*. <http://ssrn.com>.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Anderson, Kirsten L. Stuart Gillan, and Daniel N Deli. (2003). Boards of Directors, Audit Committees, and The Information Content of Earnings. *Weinberg Center for Corporate Governance Working Paper No. 2003-04*.
- Bapepam. Peraturan Nomor X.K.6 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik. www.bapepam.go.id.
- Bapepam. Peraturan Nomor IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Bernad, H. (2011). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*. Depok : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bradbury, M.E., Y.T. Mak and S.M. Tan. (2002). *Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals*. <http://ssrn.com/abstract=535764>.
- Brick, Ivan E and N.K Chidambaran. (2007). *Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance*. <http://ssrn.com/abstract=1108241>.
- Bryan, Daniel., Carol Liu MH and Tiras SL. (2004). *The Independent and Effective Audit Committees On Earnings Quality*. <http://ssrn.com/abstract=488082>.
- Bursa Efek Jakarta, 2001, SE-008/BEJ/12-2001. Keanggotaan Komite Audit.
- Carcello,J., Hollingsworth C., A. Klein, and Neal T. (2008). Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management. *NYU Working Paper No. 2451/27455*.
- Cook, Kirsten A., Ryan Huston, and Thomas Omer. (2008). Earnings Management through Effective Tax Rates: The Effects of Tax Planning Investment and the Sarbanes-Oxley Act of 2002. *Contemporary Accounting Research, Vol. 25, No. 2*.

- Daniri, Ahmad. (2006). *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta Raya: Indonesia.
- De Zoort, F.T dan Salterio. (2001). The Effect of Corporate Governace Experience and Financial Reporting and Audit Committee on Audit Knowledge on Committee Members “Judgments”. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 20: 31-45.
- Derashid, Chek and Hao Zhang. (2003). Effective Tax Rates and the 'Industrial Policy' Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 12, pp. 45-62.
- Desai, Mihir A., and D. Dharmapala. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Desai, Mihir A. and D. Dharmapala. (2007). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. <http://ssrn.com/abstract=689562>.
- Dhaliwal, Dan., Cristi A. Gleason, and Lillian F. Mills. (2003). Last Chance Earnings Management: Using the Tax Expense to Meet Analysts' Forecasts. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 21, No. 2.
- Dhaliwal, Dan., Vic Naiker, and Farshid Navissi. (2006). *Audit Committee Financial Expertise, Corporate Governance and Accruals Quality : An Empirical Analysis*. <http://ssrn.com/abstract=906690>.
- Dyreg, Scott., Michelle Hanlon, and Edward L Maydew. (2007). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*.83.61-82.
- Friese, Arne., Simon Link, and Mayer Stefan. (2006). *Taxation And Corporate Governance*. <http://ssrn.com/abstract=877900>.
- Garven, Sarah A. (2009). *The Effect of Board and Audit Committee Characteristics on Real Earnings Management: Do Boards and Audit Committees Play a Role in its Constraint?*. www.cba.ua.edu.
- Gujarati, Damodar. (2004). *Basic Econometric (2nd Ed)*. New York : McGraw-Hill Book Company.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo
- Halperin, Robert and Richard Sansing. (2005). Is the Effective Tax Rate an Effective Performance Measure?. <http://ssrn.com/abstract=761686>.

- Hanlon, M., and Shane Heitzman. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50 127–178.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, Indah. (2010). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Depok : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lin, W Jerry., June F Lin and Joon S Yang. (2006). The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21. No. 9. pp. 921-933.
- Lumbantoruan , Sophar. (1996). *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Mangena, M., and R. Pike. (2005). The Effect of Audit Committee Shareholding, Financial Expertise and Size on Interim Financial Disclosures. *Accounting and Business Research*.
- McDaniel, Linda., Roger D Martin, and Lauren A Maines. (2002). Evaluating Financial Reporting : The Effect of Financial Expertise vs Financial Literacy. *The Accounting Review, Vol. 77, Supplement: Quality of Earnings Conference, pp. 139-167*.
- Mashayekhi, B. (2008). Corporate Governance and Earnings Management: Evidence from Iran. *Afro-Asian J. of Finance and Accounting, Vol: 1, No.2, 180 – 198*.
- Mills, L., M. Erickson, and E. Maydew. (1998). Investments in Tax Planning. *Journal of the American Taxation Association* 20, 1-20.
- Minnick, Kristina and Tracy Noga. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance* 16 (2010) 703–718.
- Nachrowi, Nachrowi D dan H. Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publications. France.

- Parulian, Safrian Rumondang. (2004). *Analisis Mengenai Hubungan Antara Komite Audit dan Komisaris Independen Dengan Praktek Manajemen Laba : Studi Empiris Perusahaan di BEJ*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Manajemen FEUI.
- Pamudji, Sugeng dan Aprillya Trihartati. (2008). Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 2, No 1*.
- Prebble, Zoe M. and Prebble, John. (2012). The Morality of Tax Avoidance. *Creighton Law Review, Vol.43, No. 3, pp. 693-745*.
- Pohan, Anwar (2011). *Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini. Edisi 1*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rego, S.O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research 20: 805-833*.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. (2008). Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.11, No.1, Hal.97-116*.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Method For Business*. USA: John Wiley and Sons, Inc.
- Suaryana, Agung. (2005). Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba. *SNA 8. Solo Tanggal 15-16 September 2005*.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Shah, Syed Zulfiqar Ali Nousheen and Zafar, Tahir Khan Durrani. (2009). Board Composition and Earnings Management an Empirical Evidence From Pakistan Listed Companies. *ISSN: 1450-2889 Issue 3*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Vafeas, N. (1999). Board Meeting Frequency and Firm Performance. *Journal of Financial Economics, 53, 1, 113-142*.

Veronica, Silvia dan Siddarta Utama. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.9, No. 3, Hal.307-326.

Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia. Buku 1, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

www.idx.co.id

www.fcgi.or.id

Xie, Biao, Wallace N. Davidson III dan Peter J. Dadalt. (2003). Earnings Management and Corporate Governance; The Role of The Board and The Audit Committee. *Journal of Corporate Finance* 9, 295–316.

Zhou, Jian, and Ken Y. Chen (2004), “Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks”, Working Paper.

LAMPIRAN 1**DAFTAR PERUSAHAAN**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	_AALI	Astra Agro Lestari
2	_ADHI	Adhi Karya
3	_AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food
4	_AKRA	AKR Corporindo
5	_ALKA	Alakasa Industrindo
6	_AMFG	asahimas flat glass
7	_ANTM	Aneka Tambang
8	_ARNA	arwana citramulia
9	_ASGR	Astra Graphia
10	_ASII	Astra International
11	_ASRI	Alam Sutera Realty
12	_AUTO	Astra Otoparts
13	_BAPA	Bekasi Asri Pemula
14	_BATA	Sepatu Bata
15	_BAYU	Bayu Buana
16	_BHIT	Bhakti Investama
17	_BMTR	Global Mediacom
18	_BRAM	Indo Kordsa
19	_BRNA	Berlina
20	_BTON	betonjaya manunggal
21	_BUDI	Budi Acid Jaya
22	_CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada
23	_CNKO	Exploitasi Energi Indonesia
24	_CPIN	Charoen Pokphand Indonesia
25	_CSAP	Catur Sentosa Adiprana
26	_CTRA	Ciputra Development
27	_CTRP	Ciputra Property
28	_CTRS	Ciputra Surya
29	_DART	Duta Anggada Realty
30	_DILD	Intiland Development
31	_DLTA	Delta Djakarta
32	_DVLA	Darya-Varia Laboratoria
33	_ELSA	Elnusa
34	_ELTY	Bakrieland Development
35	_EPMT	Enseval Putera Megatrading
36	_EXCL	XL Axiata
37	_FAST	Fast Food Indonesia

38	_FASW	Fajar Surya Wisesa
39	_FISH	Fishindo Kusuma Sejahtera
40	_FORU	Fortune Indonesia
41	_GEMA	Gema Grahasarana
42	_GGRM	Gudang Garam
43	_GJTL	Gajah Tunggal
44	_GMTD	Gowa Makassar Tourism Development
45	_HERO	Hero Supermarket
46	_HMSP	H.M. Sampoerna
47	_IKBI	Sumi Indo Kabel
48	_IMAS	Indomobil Sukses Internasional
49	_INAF	Indofarma
50	_INDF	Indofood Sukses Makmur
51	_INDS	Indospring
52	_INTA	Intraco Penta
53	_INTP	indocement tunggal prakasa
54	_ISAT	Indosat
55	_JPFA	Japfa Comfeed Indonesia
56	_JSPT	Jakarta Setiabudi Internasional
57	_JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa
58	_KAEF	Kimia Farma
59	_KARK	Dayaindo Resources International
60	_KBLI	KMI Wire & Cable
61	_KDSI	Kedawang Setia Industrial
62	_KIJA	Kawasan Industri Jababeka
63	_LAMI	Lamicitra Nusantara
64	_LION	Lion metal works
65	_LMSH	Lionmesh Prima
66	_LPCK	Lippo Cikarang
67	_LPKR	Lippo Karawaci
68	_LSIP	PP London Sumatra Indonesia
69	_MAPI	Mitra Adiperkasa
70	_MBAI	Multibreeder Adirama Indonesia
71	_MDLN	Modernland Realty
72	_MDRN	Modern Internasional
73	_MERK	Merck
74	_MICE	Multi Indocitra
75	_MLBI	Multi Bintang Indonesia
76	_MRAT	Mustika Ratu
77	_MTDL	Metrodata Electronics
78	_NIKL	Pelat timah nusantara
79	_OKAS	Ancora Indonesia Resources
80	_OMRE	Indonesia Prima Property

81	_PANR	Panorama Sentrawisata
82	_PBRX	Pan Brothers
83	_PGAS	Perusahaan Gas Negara
84	_PJAA	Pembangunan Jaya Ancol
85	_PLIN	Plaza Indonesia Realty
86	_PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam
87	_PTSP	Pioneerindo Gourmet International
88	_PUDP	Pudjadi Prestige
89	_RDTX	Roda Vivatex
90	_RICY	Ricky Putra Globalindo
91	_RUIS	Radiant Utama Interinsco
92	_SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce T
93	_SCMA	Surya Citra Media
94	_SDPC	Millennium Pharmacon International
95	_SGRO	Sampoerna Agro
96	_SIPD	Sierad Produce
97	_SMAR	Smart
98	_SMCB	Holcim Indonesia
99	_SMRA	Summarecon Agung
100	_SMSM	Selamat Sempurna
101	_SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo
102	_SONA	Sona Topas Tourism Industry
103	_SPMA	Suparma
104	_SRSN	Indo acidatama
105	_SSIA	Surya Semesta Internusa
106	_TBLA	Tunas Baru Lampung
107	_TCID	Mandom Indonesia
108	_TGKA	Tigaraksa Satria
109	_TINS	Timah
110	_TIRA	Tira Austenite
111	_TLKM	Telekomunikasi Indonesia
112	_TMPO	Tempo Intimedia
113	_TOTL	Total Bangun Persada
114	_TRAM	Trada Maritime
115	_TRIL	Triwira Insanlestari
116	_TSPC	Tempo Scan Pacific
117	_TURI	Tunas Ridean
118	_ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company
119	_UNSP	Bakrie Sumatra Plantations
120	_UNTR	United Tractors
121	_UNVR	Unilever Indonesia
122	_VOKS	Voksel ElectricAstra International
123	_WIKA	Wijaya Karya

LAMPIRAN 2**Model 1****Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.542964	(122,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	324.856602	122	0.0000

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.087939	10	0.0535

Hasil Regresi Model Pertama

Dependent Variable: CURRENT_ETR?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/22/12 Time: 13:49
 Sample: 2009 2010
 Included observations: 2
 Cross-sections included: 123
 Total pool (balanced) observations: 246

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.710197	0.232732	3.051564	0.0025
B_MEET?	0.000683	0.001578	0.432592	0.6657
B_ATTEND?	-0.068572	0.082563	-0.830536	0.4071
B_HEAD?	0.003894	0.019998	0.194699	0.8458
AU_QUANTITY?	0.007992	0.021418	0.373152	0.7094
AU_MEET?	-0.000585	0.001309	-0.446855	0.6554
AU_ATTEND?	0.011911	0.105044	0.113392	0.9098
AU_FINEXP?	-0.073835	0.045674	-1.616560	0.1073
ROA?	-0.398636	0.111024	-3.590534	0.0004
DER?	0.005644	0.006692	0.843446	0.3998
SIZE?	-0.010782	0.006489	-1.661469	0.0980

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.078871	0.4436
Idiosyncratic random	0.088340	0.5564

Weighted Statistics

R-squared	0.090047	Mean dependent var	0.182099
Adjusted R-squared	0.051325	S.D. dependent var	0.092246
S.E. of regression	0.089848	Sum squared resid	1.897056
F-statistic	2.325496	Durbin-Watson stat	2.105359
Prob(F-statistic)	0.012544		

Unweighted Statistics

R-squared	0.088400	Mean dependent var	0.293300
Sum squared resid	3.316614	Durbin-Watson stat	1.204235

Statistik deskriptif

	CURRENT_ET	C	B_MEET?	B_ATTEND?	B_HEAD?	QUANTIT	AU_MEET?	AU_ATTEND?	U_FINEXP	ROA?	DER?	SIZE?
Mean	0.293300	1.000.000	6.878.049	0.942629	0.268293	3.203.252	8.203.252	0.956841	0.799146	0.085302	1.309.044	2.824.906
Median	0.273058	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0.000000	3.000.000	6.000.000	1.000.000	0.750000	0.058386	1.017.004	2.813.114
Maximum	0.846491	1.000.000	4.500.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	4.800.000	1.000.000	1.000.000	0.406695	1.015.777	3.235.714
Minimum	0.003080	1.000.000	1.000.000	0.333333	0.000000	3.000.000	1.000.000	0.575000	0.250000	-0.002806	0.065520	2.496.867
Std. Dev.	0.121860	0.000000	6.067.761	0.100166	0.443974	0.510452	7.907.072	0.088170	0.203466	0.080958	1.274.025	1.509.367
Skewness	1.576.097	NA	3.073.282	-2.230.725	1.045.916	2.491.088	2.889.399	-2.268.859	-0.571820	1.709.804	3.046.408	0.299836
Kurtosis	7.557.417	NA	1.612.272	9.442.765	2.093.939	8.203.340	1.217.957	7.680.887	2.656.072	6.017.683	1.701.777	2.838.603
Jarque-Bera	3.147.403	NA	2.152.358	6.294.910	5.326.621	5.319.424	1.206.004	4.356.413	1.461.855	2.132.013	2.394.607	3.952.956
Probability	0.000000	NA	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000669	0.000000	0.000000	0.138556
Sum	7.215.173	2.460.000	1.692.000	2.318.867	6.600.000	7.880.000	2.018.000	2.353.829	1.965.900	2.098.419	3.220.248	6.949.270
Sum Sq. Dev.	3.638.234	0.000000	9.020.341	2.458.152	4.829.268	6.383.740	15317.84	1.904.621	1.014.266	1.605.763	3.976.692	5.581.562
Observations	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Cross sections	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

LAMPIRAN 3**Model 2****Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.943189	(122,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	408.263524	122	0.0000

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.642079	10	0.1103

Hasil Regresi Model Kedua

Dependent Variable: GAAP_ETR?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/22/12 Time: 13:57

Sample: 2009 2010

Included observations: 2

Cross-sections included: 123

Total pool (balanced) observations: 246

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.107803	0.242741	4.563715	0.0000
B_MEET?	0.001344	0.001692	0.794627	0.4276
B_ATTEND?	-0.061672	0.079900	-0.771863	0.4410
B_HEAD?	0.002676	0.020885	0.128138	0.8981
AU_QUANTITY?	-0.032466	0.021812	-1.488428	0.1380
AU_MEET?	0.000213	0.001361	0.156142	0.8761
AU_ATTEND?	-0.323843	0.100134	-3.234115	0.0014
AU_FINEXP?	-0.013374	0.048726	-0.274478	0.7840
ROA?	-0.278948	0.115618	-2.412680	0.0166
DER?	0.005861	0.006775	0.865155	0.3878
SIZE?	-0.012715	0.007014	-1.812980	0.0711

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.095789	0.6102
Idiosyncratic random		0.076556	0.3898

Weighted Statistics			
R-squared	0.094329	Mean dependent var	0.128661
Adjusted R-squared	0.055789	S.D. dependent var	0.079725
S.E. of regression	0.077470	Sum squared resid	1.410362
F-statistic	2.447602	Durbin-Watson stat	2.078291
Prob(F-statistic)	0.008512		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.081977	Mean dependent var	0.261505
Sum squared resid	3.513273	Durbin-Watson stat	0.834306

Analisis Deskriptif

	GAAP_ETR?	B_MEET?	B_ATTEND?	B_HEAD?	_QUANTIT	AU_MEET?	AU_ATTEND?	U_FINEXP	ROA?	DER?	SIZE?
Mean	0.261505	6.878.049	0.942629	0.268293	3.203.252	8.203.252	0.956841	0.799146	0.085302	1.309.044	2.824.906
Median	0.256531	4.000.000	1.000.000	0.000000	3.000.000	6.000.000	1.000.000	0.750000	0.058386	1.017.004	2.813.114
Maximum	0.824653	4.500.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	4.800.000	1.000.000	1.000.000	0.406695	1.015.777	3.235.714
Minimum	0.003107	1.000.000	0.333333	0.000000	3.000.000	1.000.000	0.575000	0.250000	-0.002806	0.065520	2.496.867
Std. Dev.	0.124982	6.067.761	0.100166	0.443974	0.510452	7.907.072	0.088170	0.203466	0.080958	1.274.025	1.509.367
Skewness	0.926594	3.073.282	-2.230.725	1.045.916	2.491.088	2.889.399	-2.268.859	-0.571820	1.709.804	3.046.408	0.299836
Kurtosis	5.976.119	1.612.272	9.442.765	2.093.939	8.203.340	1.217.957	7.680.887	2.656.072	6.017.683	1.701.777	2.838.603
Jarque-Bera	1.259.888	2.152.358	6.294.910	5.326.621	5.319.424	1.206.004	4.356.413	1.461.855	2.132.013	2.394.607	3.952.956
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000669	0.000000	0.000000	0.138556
Sum	6.433.024	1.692.000	2.318.867	6.600.000	7.880.000	2.018.000	2.353.829	1.965.900	2.098.419	3.220.248	6.949.270
Sum Sq. Dev.	3.826.998	9.020.341	2.458.152	4.829.268	6.383.740	15317.84	1.904.621	1.014.266	1.605.763	3.976.692	5.581.562
Observations	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Cross sections	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123